Perencanaan Tata Guna Lahan Desa Kaluku Tinggu

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa Kaluku Tinggu Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah secara geografis, 55,33 persen (747,59 Ha) wilayah desanya ditetapkan sebagai kawasan hutan , penetapan ini merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.869/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Sigi terdapat 114 dari 157 desa yang berbatasan langsung dan berada di kawasan hutan, 76,16% (seluas ± 392.988 hektar) dari 520.166 hektar total luas wilayah Kabupaten Sigi adalah kawasan hutan dan hanya tersisa kawasan pertanian serta perkebunan masyarakat seluas 19,22%. kondisi tesebut yang kemudian melatar belakangi pemerintah Kabupaten Sigi mencanangkan pelaksanaan Reforma Agraria sebagai salah satu program khusus Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017, serta secara terpisah dikerjakan melalui suatu gugus tugas yang disebut Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Sigi tanggal 3 Januari 2017, Nomor 590-001 Tahun 2017.

Kabupaten Sigi mengusulkan tiga kategori Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). Perinciannya: pertama, TORA yang berasal dari tanah negara seluas 7.211,50 hektar di 57 desa dan 14 kecamatan. Kedua, TORA yang berasal dari

pelepasan kawasan hutan seluas 78.773,30 hektar di 61 desa dan 14 kecamatan. Sumber tanahnya adalah kawasan hutan konservasi (56.537,70 hektar), hutan lindung (15.384,26 hektar), hutan

produksi konversi (2.905,84 hektar), dan hutan produksi terbatas (3.945,50 hektar). Ketiga, areal Hutan Desa dan Hutan Adat seluas 51.741,71 hektar yang terdiri atas usulan Hutan Desa (4.802,71 hektar) dan Hutan Adat (46.939,00 hektar) di 8 desa dan 6 kecamatan se-Kabupaten Sigi¹

Desa Kaluku Tinggu merupakan salah satu desa dari 61 desa pengusul perluasan wilayah kelolanya dengan skema TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, secara eksisting 17,79 Ha yang diajukan sudah dikelola oleh 5 KK yang dimanfaatkan untuk lahan tanaman keras dan perkebunan coklat. Di desa Kaluku Tinggu komoditas hasil pertanianya selaian tanaman yang bersifat musiman juga terdapat tanaman tahunan. Tanaman yang bersifat musiman seperti tanaman pangan khususnya padi sawah dan jagung, varietas tanaman padi sawah yang dibudidayakan antara lain Cisantana, Ciherang, Impari 42 dan sebagain kecil ada yang menanam padi tinggaloko (pulut hitam), polo jawa dan pulei (padi merah). Untuk penanaman padi dilakukan tidak serentak karena adanya sistem pembagian giliran air irigasi dalam setiap enam bulan sekali, saat lahan sawah yang berada di dusun I mendapatkan giliran air irigasi, maka 6 (enam) bulan berikutnya di dusun II, sambil menunngu giliran air dari irigasi, baiasanya lahan sawah digunakan untuk menanam jagung maupun tanaman hortikultura lainya, varieatas jagung yang ditanam di desa Kaluku Tinggu yang paling banyak diusahakan oleh petani adalah varietas lokal atau jagung biaha (jagung merah) selain itu juga terdapat varietas jagung hibrida dan jagung manis. Dan utuk komoditas tanam tahunan yang diusahakan oleh petani seperti coklat dan kelapa namun komoditas tanam tersebut hanya dimilki oleh sebagian kecil warga. Selain sebagai petani, warga desa Kaluku Tinggu dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari khususnya petani yang berlahan sempit serta petani yang tidak mempunyai tanah, bekerja sebagai buruh kasar (bangunan).

Pada 28 September 2018, saat terjadi gempa bumi di Palu, Sigi dan Donggala dengan kekuatan 7,4 Sr yang diakibatkan oleh pergerakan sesar Palu-Koro, berdampak pada rusaknya rumah warga, terdapat 8 rumah yang mengalami rusak berat dan kurang lebih ada

_

¹ KSP dan Pemerintah Kabupaten Sigi, 2017. Navigasi Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

60 rumah yang yang mengalami rusak sedang dan ringan, walau tidak menimbulkan korban jiwa tetapi ada sebagain warga yang managalami luka sedang dan ringan. Untuk mengantisipasi adanya gempa susulan warga desa Kaluku Tinggu kemudian memilih untuk mengunggsi selama 4 (empat) bulan namun tetap masih di wilayah desa yang dianggab aman kemudian selama satu bulan pasca gempa, warga juga tidak melakukan aktivitas pertanian (produksi), dalam memenuhi kebutuhan sehari – sehari khususnya kebutuhan pangan satu minggu sebelum datangnya bantuan, warga desa memanfaatkan hasil kebun yang masih tersedia seperti pisang, ubi maupun jagung,. Gempa juga berakibat pada rusaknya saluran irigasi yang ada di dusun II yang berakibat tidak mengalirnya air ke sawah, kemudian ada beberapa warga yang mengganti lahan sawahnya yang awalnya ditanam padi menjadi tanaman jagung

Disisi lain, berdasarkan Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan sekitarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara keseluruhan wilayah desa Kaluku Tinggu ditetapkan sebagai kawasasan Zona Rawan Bencana (ZRB), untuk pemukiman , sawah dan sebagian Kawasan hutan masuk dalam ZRB 2 G atau Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah dan sebgain besar Kawasan hutan dan kebun campuran warga yang berada di sebelah barat pemukiman berada pada ZRB 3 G atau Zona Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi.

Dengan kondisi diatas, belum efektifnya sektor pertanian dan secara keseluruhan wilayah desa yang masuk dalam Kawasan Zona Rawan Bencana serta tidak adanya Perencanaan tata guna lahan di desa, menjadi bagian yang semestinya diperhatikan. Perencanaan tata guna lahan nantinya dapat dijadikan bagian dari tindak-lanjut bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai pembangunan sesuai dengan daya dukung lahan serta berkesuasain dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dapat juga di manfaatkan untuk menggali pontensi yang ada di desa dan mengkonsep pengembangan potensinya serta memonitoring proses berjalannya program tersebut. Perencanaan tata guna lahan tersebut harus dibangun atas dasar partisipatif masyarakat dengan metode Participatory land Use Planning (PLUP) yang juga harus berbasis mitigasi dengan melihat kondisi desa yang wilayahnya masuk dalam Area Zona Bencana.

PLUP sendiri merupakan pengembangan dari Pemetaan Partisipatif, yang kemudian merangkum data sosial yang berfungsi untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan sosial - ekonomi desa, berikutnya selain data sosial juga terdapat data spasial yang membangun proses informasi kewilayahan. Disisi lainya kegiatan ini dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian masalah batas desa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pemetaan Partisipatif menempatkan masyarakat menjadi kunci dalam setiap kegiatan pemetaan partisipatif, dimana masyarakatlah yang harus menjadi penyelengara, penentu manfaat peta yang akan dibuat, penentu subtansi pemetaan, pengontrol hasil dan pelaku utama kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil desa melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan Lahan. Dengan demikian, Profil Desa merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di desa.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data

PLUP (Participatory Land Use Planning) merupakan pengembangan dari Pemetaan Partisipatif (Community Mapping). Pada tahun 1960-an Pemetaan Partisipatif telah di aplikasikan, dan di Indonesia mulai digunakan pada tahun 1990-an, dan di tahun 1996, JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) kemudian menegembangkannya, baik metode teknisnya maupun metodelogi sosialnya, JKPP memberikan tekanan yang kuat pada proses "Partisipatif", dimana masyarakat harus menjadi pelaku utama sebagai perencana, pelaku

serta pengambil manfaat, adapaun pihak luar yang terlibat hanya sebagai pendukung proses teknis Pemetaan Partisipatif atau PP (Restu, 2006)

Ide awal PP adalah, pertama sebuah bentuk dari ketidakpuasaan terhadap penggunaan peta Sketsa dan transek yang digunakan dalam metode PRA (Participatory Rural Appraisal) yang dianggap kurang menilai penggunaan sumber daya alam di desa, kedua sebagai bentuk kritik atas metode penelitian dan survey konvensional yang hanya memanfaatkan ornag kampong sebgai subyek, ketiga, sebgai bentuk kriritik atas penggunaan metode pemetaan konvensional yang sering kali tidak mencantumkan pengetahuan kekayaan/keruangan masyarakat dan terakhir ke-empat dibutuhkanya peta tertulis untuk menunjukkan klaim masyarakat terhdapa suatu wilayah dalam proses advokasi Sumber Daya Alam (Restu,2006).

Waktu kegiatan penyusunan laporan profil desa dimulai sejak pelaksanaan FGD (focus Group Discusion) pengambilan data sosial serta spasial, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kampung dan berakhir pada saat finalisasi draf Profil desa, Sedangkan Wawancara, Observasi, dan Studi dokumen mulai dilaksanakan setelah pelaksanaan FGD pengambilan data sosial hingga sebelum Draft Final

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

- 1. Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstrutur
- 2. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion, FGD) melibatkan anggota yang berasal dari masyarakat Desa yang telah dipilih dan diundang berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu para Aparatur Desa, Ketua Dusun (RT), Tokoh Masyarakat serta masyarakat desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan. Diskusi Terfokus dalam pemetaan partisipatif ini dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pertemuan desa untuk sosialisasi pemetaan sosial dan spasial dan penggambaran peta sketsa penggunaan lahan awal digunakan sebagai data tambahan, bagi penulisan draf laporan akhir;
- b. Pertemuan desa mengenai penggambaran tata guna lahan di atas peta citra;
- c. Pertemuan desa untuk verifikasi peta sketsa, peta citra dan draf profil desa bersama warga;
- d. Pertemuan desa hasil peta dan kesepakatan tata batas
- 3. Pengamatan langsung dilakukan di Desa, dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.
- 4. Studi dokumen digunakan untuk mencari data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber data sekunder yang akan digunakan diantaranya; kecamatan dalam angka,monografi, RPJMDes, dan peta partisipatif yang pernah dilakukan.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Bab.

BAB I KONDISI DESA

1.1 Pendahuluan

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa

1.2 Gambaran Umum Lokasi Desa

Menunjukan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

1.3 Lingkungan Fisik, Ekosistem Dan Zona Rawan Bencana

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hanyati, vegetasi, serta informasi mengenai zona rawan bencana di desa

1.4 Kependudukan

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

1.5 Kesehatan Dan Pendidikan

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan.

1.6 Kesejarahan Dan Kebudayaan Masyarakat

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/ permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikan, serta kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

1.7 Pemerintahan Dan Kepemimpinan

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

1.8 Kelembagaan Sosial

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

1.9 Perekonomian Desa

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa, asset-asset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari asset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

2.0 Nilai Indeks Desa Membangaun

Untuk mengetahui kategori Desa Berdasarkan nilai IDM-nya

BAB 2 KAJIAN RESIKO BENCANA DAN RENCANA PENENGGULANGAN BENCANA

2.1 Sejarah dan Dampak Bencana Di Sulawesi Tengah

Memuat tentang Sejarah yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, serta dampak bencanaya

2.2 Sejarah dan Dampak Bencana Di Desa

Memuat tentang Sejarah Bencana Di Desa serta Dampak yang ditimbulkan Bencana

2.3 Penilaian Resiko Bencana

Menggali potensi yang ditimbulkan akibat akibat bencana, dengan menentukan Pemeringkatan Bencana, karakter Bencana, Penilaian atas ancaman, kerentanan serta kapasitas yang dimiliki oleh warga dalam menghadapi Bencana

2.4 Rencana Penaggulangan Bencana

Berisi tentang perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas serta Pengembangan system peringatan dini

BAB 3. PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

3.1 Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Dan Sumber Daya Alam

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (land use), penguasaan lahan dan bentuk

pengakuan

3.2 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan

Mengkaji dengan metode partisipatif tingkat keseuaian lahan pada penggunaan lahan di desa

3.3 Rencana Tata Guna Lahan di Desa

Membuat perencanaan Tata Guna Lahan berbasis Analisis Kesesuaian Lahan

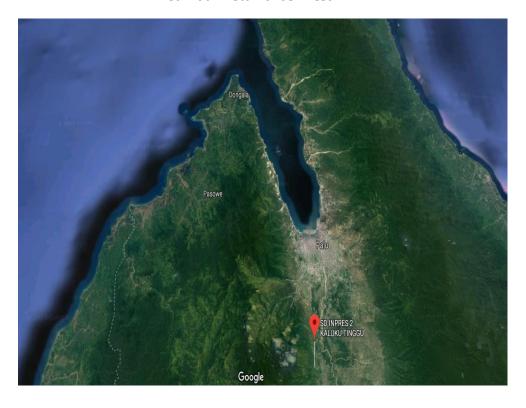
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran

BAB II Kondisi Umum Desa

2.1.1 Letak Desa

Desa Kaluku Tinggu secara astronomi berada pada titik koordinat S 1.033845 Lintang Selatan dan E 119.854819 Bujur Timur, kedudukan georafis desa Kaluku Tinggu berada di sebelah barat dari ibu kota Kecamatan Dolo Barat. Serta di sebelah selatannya Sigi Binomoru, ibukota kabupaten Sigi, dan dari pusat kota Palu Ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, juga mengarah ke selatan.



Gambar Peta Lokasi Desa

Orbitasi Desa

Dari Jalan Poros Palu – Bangga Desa Pewunu ke desa Kaluku Tinggu berjarak ± 1,7 Km mengarah ke desa Balaroa Pewunu, Jika dari Pusat pemerintahan Sulawesi Tengah, tepatnya dari kantor Gubernur Sulawesi Tangah yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi kota Palu menuju Desa Kaluku Tinggu, melewati Jalan Jenderal Sudirman menuju jalan Sultan Hasanudin ke Jalan Gajah Mada kemudian ke Jalan Sis - Aljufri dan ke Jalan Ke Pue Bongo dan Kemudian

ke Jalan Poros - Palu Bangga, Jarak tempuh 19 Kilo meter dengan perkiraan waktu tempuh ± 39 Menit dengan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Sedangkan dari Pusat pemerintahan Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Bora Sigi Bimomaru menuju ke desa Kaluku Tinggu, jarak tempuhnya ± 14 Kilometer dan dapat dilalui dengan kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat dengan waktu 30 menit, dengan melewati jalan Poros Palu - Palulo menuju ke Jalan Poros Palu Kulawi dan kemudian ke Jalan Kaleke - Dolo dan ke Jalan Poros Palu - Bangga. Dan dari pusat pemerintahan kecamtan Dolo Barat yang berkedudukan di desa Kaleke, berjarak tempuh ± 3,7 Km dengan waktu tempuh ± 6 menit dengan kendaraan bermotor, yang mengarah ke utara Jalan Poros Palu -Bangga menuju jalan veteran.

Tabel Orbitasi Desa

No	Uraian	Keterangan	
1	Ke ibukota Kecamatan :		
	Jarak ke ibukota Kecamatan	± 3,7 Km	
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	± 6 menit	
	Moda transportasi ke ibukota Kecamatan	Kendaraan bermotor dan anggkutan umum	
	Kondisi jalan	Beraspal	
2	Ke ibukota Kabupaten Sigi: Jarak ke ibukota Kabupaten	± 14	
	Lama jarak tempuh ke ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	± 30 menit	
	Moda transportasi ke ibukota Kabupaten	Kendaraan bermotor	
	Kondisi jalan	Beraspal dan di beberapa ruas jalan rusak	
3	Ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah :		
	Jarak ke ibukota Provinsi	± 19 KM	
	Lama jarak tempuh ke ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	± 39 Menit	
	Moda transportasi Ke Ibu Kota Propinsi	Kendaraan bermotor	

Kondisi jalan	Beraspal dan di beberapa ruas jalan
	rusak

Sumber Wawancara

2.3 Batas dan Luas Wilayah

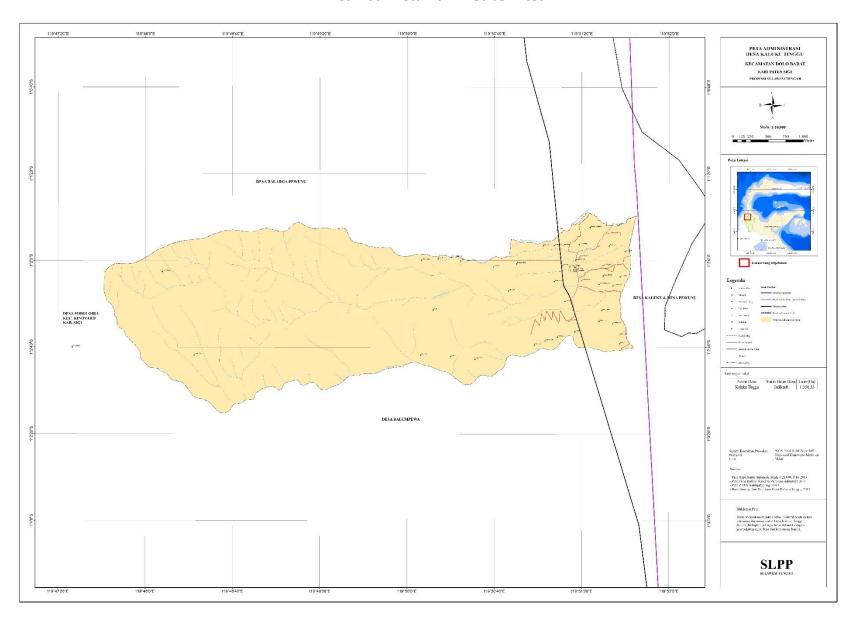
Luas desa Kaluku Tinggu hasil dari pemetaan partisipatif yang dilakukan masyasrakat pada tahun 2019 luas Desa 1350,53 Ha atau 13,50Km² yang dibagi menjadi 2 (dua) dusun . Sedangkan untuk batas, desa Kaluku Tinggu lebih terperinci, ada pada tabel berikut:

Tabel Batas Desa

Uraian Batas	Desa	Kecamatan
Utara	Waturalele	Dolo
	Balaroa Pewunu	Dolo Barat
Selatan	Balampewa	Dolo Barat
Timur	Kalele dan Pewunu	Dolo Barat
Barat	Pobolobia	Kinavaro, Sigi

Sumber Peta Administrasi Partisipatif

Gambar Peta Administrasi Desa



2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Untuk melihat kondisi fasilitas umum dan sosial yang ada di Desa Kaluku Tinggu digunakan penilaian kelayakannya berdasarkan kondisi fisik, berfungsinya per bagian maupun keseluruhan serta kelengkapan fasilitas umum dan sosial tersebut, menurut hasil diskusi dengan masyarakat . Fasilitas umum dan sosial yang terdapat di Desa Kaluku Tinggu masih sangat perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jenisnya, jumlah, misalkan untuk sarana pendidikan, hanya samapai tingkat SMP, dan dari segi jumlah, minimnya fasilitas kesehatan yang hanya berupa polides, sedangkan untuk kegiatan kesehatan, seperti posyandu harus menumpang di tempat lain, sedangkan dari segi jenis di desa Kaluku Tinggu tidak terdapat fasilitas sosial untuk pemuda, misalkan seperti gedung untuk latihan kesenian serta gedung untuk PKK dan kantor BPD dll, namun untuk kondisi bagunan atau fisik masih dibilang cukup layak, Berikut adalah lebih terperinci menganai kondisi Fasilitas sosial dan Umum di desa Balaroa Pewunu:

Tabel Fasilitas Umum Desa

No	Fasilitas Umum	Lokasi	Kondisi
	Jalan Desa	Di dusun I dan II	Sudah berbentuk jalan Aspal
	Jalan Produksi (Pertanian)	Di dusun I da II	Pengerasan dan sudah ad yang di rabat beton
	Jembatan	Dusun II	Dalam bentuk aspal
	Bak Air	Di dusun I	Kondinya layak

Sumber Observasi

Tabel Fasilitas Sosial

Fasilitas Sosial	lokasi	Kondisi
Saran	a Pendidikan	

SD Inpres	Dusun II	Bangunan Permanen
SMP Satu Atap	Dusun II	Bangunan Permanen
TK Al Munawah	Dusun II	Bangunan Permanen
	Sarana Ibadah	
Masjid An - Nur	Dusun II	Bangunan Permanen lantai
		keramik
	Sarana Kesehatan	
Polindes	Dusun II	Bangunan Permanen
9	Sarana Pemerintaha	n
Kantor Desa	Dusun II	Bangunan Permanen
Gedung LSPBM	Dusun II	Bangunan Permanen

Sumber Observasi

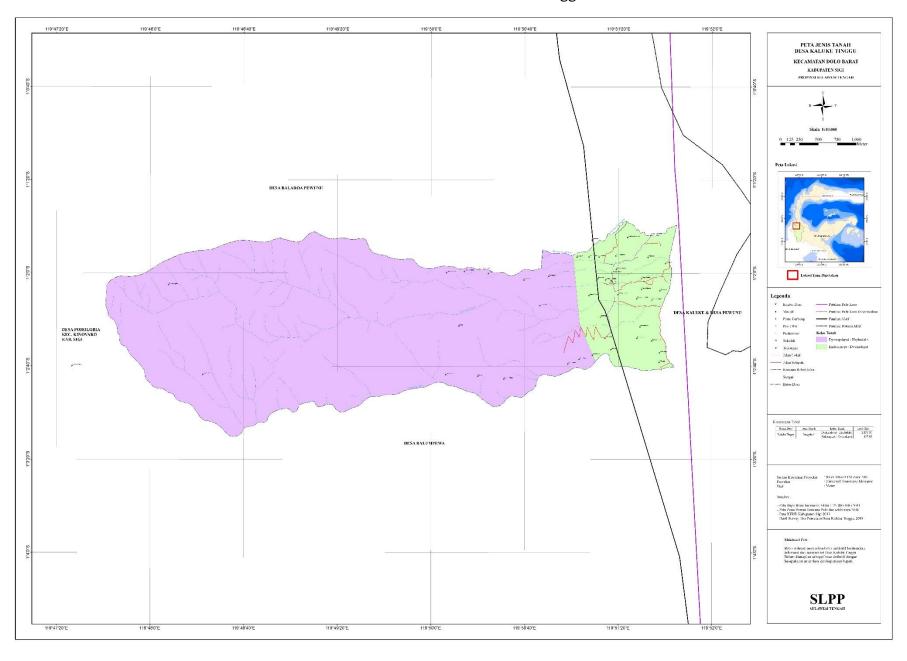
Kondisi Topografi Desa

Menurut data yang dihimpun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kecamatan Dolo Barat dalam Angka 2019, 10 persen berupa daratan, 50 persen perbukitan dan 40 persen pegunungan. Jika Topografi desa Kaluku Tinggu dapat dikwalifikasi berdasarkan penggunaan lahanya,umumnya wilayah pemukiman serta lahan persawahan, sebagian kebun berada di daratan, untuk wilayah pemukiman berpola linier mengikuti jalan desa dan jika dilihat dari jeni vegetasinya di wilayah desa yang berupa daratan, didominasi oleh tanaman yang dibudidaya yang bersimfat musiman, seperti padi sawah, jagung maupun tanaman hortikultura lainnya, untuk lahan sawah terbesar ada di sebelah timur pemukiman. Sedangkan untuk wilayah perbukitan dan pegunungan, untuk penggunaan lahanya dimanfaatkan sebagai area pengembalaan ternah, sarana wisata serta Kawasan hutan, dan kebun masyarakat dan jika dilihat jenis vegetasinya untuk Kawasan perkebunan masyarakat yang erada di perbukitan berupa komoditas tanaman tahunan seperti coklat

Geomorfologi dan Jenis Tanah

Definisi tanah dari sudut pandang geormofologi, merupakan akumulasi tubuh alam yang memiliki sifat lepas - lepas yang menempati seluruh bagian bumi, hasil lapukan bahan induk sebagai pengaruh organisme dan iklim pada relief tertentu dan dalam jangka waktu yang panjang serta mampu untuk menumbuhkan tanaman (Jamulya & Sutarman). Berikut adalah peta Klasifikasi Tanah di Desa Kaluku Tinggu

Peta Jenis Tanah Desa Kaluku Tinggu



Berdasar bahan pembentukanya², tanah yang ada di Kaluku Tinggu termaksud tanah mineral, jika kita klasifikasikan tanah berdasar ketentuan "Key Soil Taxonomy" edisi 12 tahun 2104, klasifikasi tanah terbagi menjadi 6 kategori, yaitu Ordo, Sub-Ordo, Great Group, family dan seri. Ordo tanah yang ditemukan di desa Balampewa merupakan Ordo Inceptisol dengan Great Group yang berkombinasi, di wilayah desa yang berupa dataran kombinasi Great Groupnya Endoaquepts – Dystrudepts, dimana great group Endoaquepts lebih dominan daripada Dystrudepts, yang bahan indukya berasal dari endapan aluvial dengan sub landformnya berupa jalur aliran sungai

Sedangkan untuk wilayah desa yang berelif pegunungan dan perbukitan kombinasi Great Groupnya Dystrudepts – Hapludults, secara umum di dominasi oleh great group Dystrudepts yang berbahan induk batuan metamorft, Batuan ini berasal dari batuan beku atau sedimen yang mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan suhu dan tekanan yang sangat tinggi dan sublandfornya jenis tanah yang berelief pegunungan berupa pegunungan tektonik,

Tanah dengan ordo Inceptisols (inceptum atau permulaan) dapat disebut tanah muda karena pembentukanya agak cepat sebagai hasil pelapukan bahan induk dan masih memiliki sifat yang menyerupai sifat bahan induknya (Hardjowigeno, 1993) dan karakteristik tanah inceptisol (1) memiliki solum tanah agak tebal , yaitu 1-2 meter, (2) warnanya hitam atau kelabu hingga coklat tua, (3) tekturnya debu, lempung berdebu, lempung, (4) struktur tanahnya rema, konsistensinya gembur, pH 5,0 – 0,7. (5) kandungan bahan organiknya cukup tinggi 10 % - 30 % (6) kandungan unsur hara sedang hingga tinggi dan (7) produktivitas tanah sedang hingga tinggi³.

_

² Berdasar bahan pembentukanya , tanah dibedakan dua kelompok besar , yaitu tanah organic dan tanah mineral, Untuk tanah mineral dibedakan berdasarkan tingkat perkembanganya menurut susuna horizon yang terbentuk, yang terbentuk terbagi atas (1) Tanah – tanah yang belum berkembang memiliki susunan horizon (A) R dan atau A-C, dan (2). Tanah – tanah yang berkembang , memiliki susunan horizon lengkap A-B-C atau A-E-B-C.

³ http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/140/2018/06/tanah-inceptisol.pdf

Tanah dengan ordo Inceptisol khususnya yang berada di relief datar sebaiknya tanaman budidaya semusim seperti padi maupun tanaman pangan lainya, hortikultura serta tanaman palawija pengendalian untuk tanah Inceptisol dapat dilakukan dengan cara pemberian asupan yang tinggi pada unsur anorganik (pemupukan berimbang N, P dan K) maupun masukan organik (pengembalian sisa panen ke dalam tanah, pemberian pupuk kandang atau pupuk hijau). Sedangkan tanah iceptisol yang berada pada kelerangan, untuk menjaga kelestarian dapat ditanam denga tanaman tahunan atau argoforestry⁴

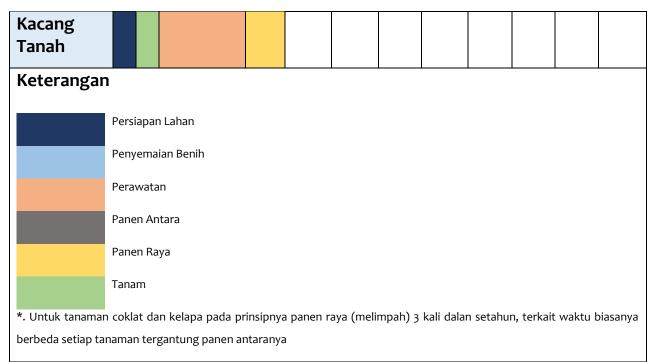
Iklim dan Cuaca

Seperti desa yang umumnya terdapat di Kecamatan Dolo Barat dan khususnya kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, Desa Kaluku Tinggu merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Namun pada dasarnya pergantian musim di desa Kaluku Tinggu sangat sulit ditentukan ketepatanya, berikut adalah kalender musim desa Kaluku Tinggu

Tabel Kalender Musim Desa Kaluku Tinggu

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
Musim	<u>ښ</u> .			<u>;</u>	<u> </u>							
Jagung												
Padi	·											
Coklat*												
Kelapa*												
Cabe												
Ketimun												

⁴ https://forda-mof.org/files/MENGENAL JENIS.pdf



Sumber Wawancara

Pada dasarnya jika dilihat berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa siklus perubahan musim yang terjadi tidak berdampak pada jenis tanaman yang dibudidayakan petani, misalkan untuk tanaman pangan seperti padi sawah, petani mulai menanam saat lahan sawah yang dimiliki mendapatkan aliran air irigasi, begitupun juga untuk tanaman jagung serta hortikultura yang umumnya tanaman pengganti padi sawah. Namun ketersediaan air saat hujan menjadi salah satu factor yang dapat meningkatkan produktifitas tanah.

Hidrologi Desa

Hidrologi atau bentuk peredaraan dan distribusi air di desa Kaluku Tinggu terbagi menjadi sistem air permukaan serta mata air, sistem air permukaan berupa sungai alami dan juga aliran air permukaan buatan dalam bentuk irigasi dan embung desa ,selain system air permukaan di desa Kaluku Tinggu juga terdapat Mata Air, berikut adalah bentuk Hidrologi di Desa Kaluku Tinggu

Tabel bentuk Hidrologi Desa Kaluku Tinggu

No	Jenis Hidrologi	Pengertian
1	Sungai	Aliran air yang memanjang yang mengalir secara terus - menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara)
2	Irigasi	Usaha penyedian dan pengaturan air untuk menunjang pertanian
3	Mata Air	Suatu keadaan alami dimana air tanah mengalir keluar dari akufier menuju permukaan tanah
4	Embung	Cekungan penampung yang digunakan untuk mengatur dan menampung air

Kondisi aliran sungai selain sungai tantioari bersifat pasang surut dan saat musim kemarau debit airnya berkurang, kejadian gempa pada 28 September 2018 berakibat pada aliran air sungai kurayo berkurang, aliaran sungai kurayo juga merupakan bagian dari jaringan hilir irigasi yang ada di dusun I dan II, berkurangnya aliran air di ngai kurayo kemudian berdampak pada penurunan debit air irigasi yang mengairi lahan persawahan di dusun I dan II. Selain untuk kepentingan pertanian keberadaan air di sungai juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat. Yang di dusun I dan II. Sedangkan keberadaan mata air di desa Kaluku Tinggu yang kondisi aliran airnya tetap stabil walau saat musim kemarau pada umumnya banyak digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari – hari seperti untuk kebutuhan mencuci, mandi, minum maupun memasak. Dan pasca gempa kondisi aliran airnya masih tetap stabil, Selain itu di desa juga terdapat embung yang masih dalam proses pembangunan yang nantinya akan digunakan untuk menampung air dari sungai wera dan digunakan untuk pengairan tanah sawah, berikut adalalah kondisi lebih detail dari setiap hidrologi yang ada di Desa Kaluku Tinggu

Tabel Kondisi Hidrologi desa Kaluku Tinggu

Uraian	Lokasi	Kondisi Aliran Air	Peruntukan dan Fungsi	Keterangan
	•	Sung	ai	
Sungai Tunai	Dusun I	Pasang Surut, musim	Diguanakan untuk	Pasca gempa, kodisi aliran
		kemarau debit air	kepentingan pertanian dan	air stabil
		kecil	kebutuhan sehari - hari	
			masyarakat di dusun I	
Sungai Kurayo	Dusun II	Pasang Surut, musim	Diguanakan untuk	Pasca gempa, aliran air
		kemarau debit air	kepentingan pertanian dan	debitnya menurun, dan
		kecil	kebutuhan sehari - hari	aliran sungai kurayo
			masyarakat di dusun I	digunakan untuk irigasi
				bergiliran dusun I dan
				dusun II
Sungai Tantiori	Dusun II	Tidak pasang surut,	Buat kebutuhan masjid	Pasca gempa, aliran air
		saat musim kemarau	dengan sebgaian	stabil
		debit air kecil	masyarakat untuk	
			kebutuhan sehari - hari	
		Mata		
Dapala	Dusun I RT 1	Saat musim Kemarau	Diguanakan untuk	Pasca Gempa debit aliran
		debit aliran air stabil	kepentingan pertanian dan	air stabil
			kebutuhan sehari - hari	
			masyarakat di dusun I	
Kurondo I	Dusun I Rt 1	Saat musim Kemarau	Diguanakan untuk	Pasca Gempa debit aliran
		debit aliran air stabil	kepentingan pertanian dan	air stabil
			kebutuhan sehari - hari	
			masyarakat di dusun I	
Kurondo II	Dusun I rt 1	Saat musim Kemarau	Diguanakan untuk	Pasca Gempa debit aliran
		debit aliran air stabil	kepentingan pertanian dan	air stabil
			kebutuhan sehari - hari	
			masyarakat di dusun I	
Kurondo III	Dusun I rt 1	Saat musim Kemarau	Diguanakan untuk	Pasca Gempa debit aliran
		debit aliran air stabil	kepentingan pertanian dan	air stabil
			kebutuhan sehari - hari	
			masyarakat di dusun I	
Tampiori	Dusun II Rt 3	Saat musim Kemarau	Diguanakan untuk	Pasca Gempa debit aliran
		debit aliran air stabil	kepentingan pertanian dan	air stabil
			kebutuhan sehari - hari	
			masyarakat di dusun II	
	T	lriga:	T.	
Irigasi Dusun II	Dusun II	Pasang surut, debit	Lahan pertanian yang	Pasca gempa rusak,
		air kecil saat musim	dusun II	saluran irigasi patah dan
		kemarau mngikuti		sudah perbaiki oleh
		aliran air sungau		masyarakat dengan dana

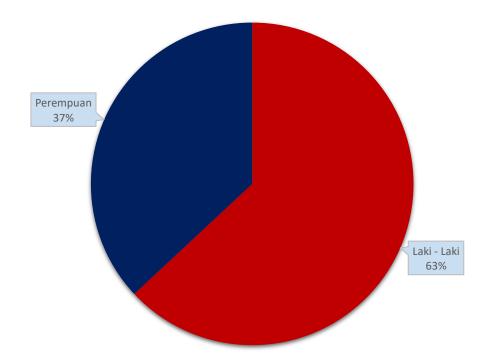
		kurayo		swadaya
Irihgasi Dusun I	Dusun I	Pasang surut, debit	Lahan pertanian yang	Pasca gempa, irigasi
		air kecil saat musim	dusun I	rusak, dan hanya
		kemarau mngikuti		ditimbun dengan tanah
		aliran air sungau		agar air tidak menyebar
		kurayo		
Embung Desa	Dusun II	Belum Berfungsi	Digunakan untuk	Menampung air dari
		(dalam proses	pengairan tanah sawah	sungai wera
		pengerjaan)	dusun I dan dusun II	

Sumber Diskusi

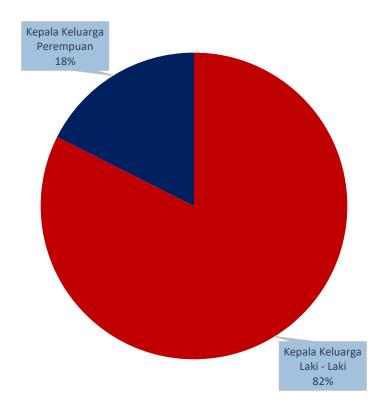
Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Kaluku Tinggu pada tahun 2018 sebesar 479 jiwa dengan 143 KK Kepala Keluaga (Profil Desa, 2018) Desa Kaluku Tinggu , untuk jumlah laki-laki sebesar 244 jiwa dan perempuan 143 jiwa atau jumlah laki – laki lebih besar 22,19 persen dibanding jumlah penduduk perempuan. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin desa Kaluku Tinggu, Untuk lebih detail lihat pada tabel dibawah ini

Grafik Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik Jumlah Kepala Keluarga (KK) Berdasarkan Jenis Kelamin



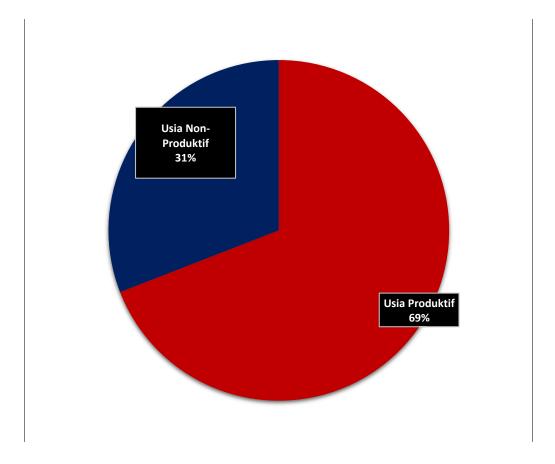
Jika dilihat dari usia produktif / usia angkatan kerja (usia 15 -64) dan usia non produktif atau usia bukan angkatan kerja (o - 14 tahun dan 65 tahun ketas) sesuai dengan ketentuan BPS (Badan Pusat Statistik), maka untuk kategori usia produktif di desa Kaluku Tinggu dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel Jumlah Penduduk Desa Berdasar Usia

No	Uraian (umur)	Total/Jiwa
1	0-14 Tahun	120
2	15-65 Tahun	331
3	65 Tahun ke atas	28
Jumlah	Jiwa	479

Sumber Data Profil Desa 2018

Gambar Grafik Jumlah Penduduk Berdasar Usia Produktif dan Non-Produktif



Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) di desa Kaluku Tinggu adalah 45 persen yang artinya setiap 100 orang yang dianggap bekerja (usia produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum dianggap produktif. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun (keduanya disebut bukan usia nagkatan kerja /usia tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (usia Angkatan kerja/usia produktif) dengan rumus⁵:

-

⁵ https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/95

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$$

RK: Rasio Ketergantungan

 $P_{(0-14)}$: Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)

P₆₅₊: Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun ke atas)

P(15-64): Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 - 54 tahun)

Menurut BPS, Rasio Ketergantungan merupakan indikator demografi terpenting, semakin tingginya representase Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang dianggap tidak produktif dan begitupun sebaliknya. Rasio Ketergantungan juga merupakan indicator kasar untuk menunjukkan keadaan ekonomi.

Angka Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk dibagi 3 jenis : pertama Kepadatan Penduduk Kasar (Crude Population Density), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk pada setiap kilometer persegi luas wilayah, kedua. Kepadatan Penduduk Fisiologis (Physiological Density) untuk melihat banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi yang diatanami (cultivable land) dan ketiga Kepadatan Penduduk Agraris (Agriculture Density), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi untuk wilayah cultivable land, nilai ini mengambarkan intensitas pertanian anatara petani terhadap lahan, berikut adalah rumusan yang dipakai ⁶

Rumusan	$KP = \frac{P}{A}$
	KP : Kepadatan penduduk
	P: Jumlah penduduk
	A: Luas wilayah (km²)

⁶ https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/85

Dengan luasan wilayah desa 13,51 Km², pada tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk desa Kaluku Tinggu sebesar 35 Jiwa/Km², artinya ada sekitar 35 jiwa yang tinggal di setiap 1 Km². Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata - rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Berikutnya untuk kepadatan Penduduk fisiologis dan Agraris, dapat dilihat dari table dibawah ini, dengan rumus:

Tabel Kepadatan Penduduk Fisiologis dan Agraris Desa 2018

Kepadatan Penduduk Fisiologis					
Jumlah penduduk desa (Jiwa)	Luas Lahan Pertanian (Km²)	Kepadatan Fisiologis (Jiwa/Km²)			
479	5,99	80			
Kepadatan Penduduk Agraris					
Jumlah Petani (jiwa)	Luas Lahan Pertanian (Km²)	Kepadatan Agraris (Jiwa/Km²)			
95	5,99	16			

Sumber data olahan

Berdasar perhitungan diatas untuk kepadatan fisiologis (physiological density) atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan tanah yang diolah, untuk desa kaluku tinggu besaranya 80 Jiwa/Km², artinya dalam satu kilo meter persegi atau 100 Ha berbading dengan 80 jiwa, atau setiap satu warga Kaluku Tinggu dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 1,25 Ha. Namun yang menjadi catatan adalah lahan khusus pangan atau lahan sawah di desa Kaluku Tinggu hanya 4 persen dari total luas wilayah desa.

Sedangakan kepadatan penduduk agraris atau perbandingan penduduk yang mempunyai aktivitas di sector pertanian atau bekerja sebagai petani dengan luas lahan pertanian di desa besaranya 16 Jiwa/Km². artinya dalam satu kilo meter persegi atau 100 Ha berbading dengan 16 jiwa warga desa yang bekerja sebagai petani, atau setiap satu warga desa Kaluku Tinggu yang berkeja sebagai Petani dapat memanfaatkan lahan pertanian yang

ada (dengan pembagian yang sama) sebesar 6,25 Ha, namun yang harus menjadi catatan berdasar data Profil Desa Kaluku Tinggu di tahun 2018 terdapat 60 KK yang tidak mempunyai lahan.

Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan

Amanat Undang – Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menadapatkan pendidikan, (pasal 31 ayat 1). Hak untuk mendapatkan pendidikan juga tertuang dalam pasal 12 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mnyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan Sesuai dengan hak asasi manusia" dalam hal ini ditekankan bahwa hak memperoleh pendidikan adalah bentuk dari Hak Asasi Manusia. Disisi lainya dalam proses penyelengaraan pendidikan harus diselengarakan secara, demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif (pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional) artinya proses penyelengaraan pendidikan di setiap daerah harus mendapatkan kwalitas serta mutu yang sama tanpa ada kategori daerah terpecil ataupun daerah maju.

Tabel Lembaga Pendidikan Formal yang terdapat di desa Kaluku Tinggu sebagai berikut:

No	Intansi Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Tenaga Pendidik		Kondisi Sarana dan Prasarana				
			Honorer	PNS	R.Kelas	Perpus takaan	Lab Komputer	Ruang Guru	Sarana Olah Raga
1	TK/PAUD Al Munawarah	± 28	4	1	Layak	-	-	Layak	Layak
2	SD Impres Kaluku Tinggu	± 137	2	6	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
3	SMP Satu Atap	± 51	2	4	Layak	-	-	Layak	-

Sumber wawancara

Jumlah tenaga pendidik pada tingkat Pendidikan formal di desa Kaluku Tinggu dari jenjang Pendidikan TK hingga SMP terdapat 19 orang yang berstatus tenaga pendidik honorer 8 rang dan yang berstatus PNS 11 orang, jumlah tenaga pendidik Honorer paling banyak ada

di jenjang Pendidikan PAUD, terkait konsdisi untuk SMP Satu Atap kuarang memadai. Keberadaan sarana Laboratorium Komputer, perpustakaan serta sarana olah raga serta fasilitas lainnya akan sangat menunjang aktivitas belajar mengajar yang kemudian dapat meningkatkan mutu pendidikan siswa maupun sekolah. Berikut adalah data tingkat pendidikan Di Desa Kaluku Tinggu

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan di desa Kaluku Tinggu hanya terdapat 1 (satu) Polides dan tenaga kesehatanya hanya 1 (satu) tenaga kesehatan yaitu bidan desa dengan status PNS dalam melaksanakan kegiatanya bidan desa dibantu oleh 5 kader Posyandu yang ada di desa, sedangkan untuk aktivitas posyandu karena tidak memiliki gedung biasanya harus menumpang ke rumah warga. jika dikaitkan dengan kesiapan untuk menghadapi penanganan kesehatan, maka ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada menjadi penting

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan juga bagian dari salah satu unsur kesejahteraan. Jamina hak atas kesehatan dapat ditemukan dalam pasal 12 ayat 1 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang - Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak _ hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan jaminan hak atas kesehatan juga ditegaskan dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

Berdasarkan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kesehatan merupakan bagaian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemrintah dan dipertegas dalan UU kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan pelaksanaan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat mulai dari proses perencanaan

sampai penyelenggaraan dan tanggung jawab yang dimaksukan adalah di khususkan pada pelayanan publik.

Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat

Sejarah Desa

Kaluku tinggu berasal dari nama orang yang menanam kelapa pertama kali di desa, nama orang tersebut tinggu, saat dia menanam kelapa pertama kali di kampung dan banyak orang mengatakan bahwa kelapa tersebut adalalah kelapanya tinggu, dan kelapa (kaluku) jadi kemuadian disebut Kaluku tinggu, dan sebgain masyarakat juga ada yang meyakini bahwa Kaluku Tinngu itu berasal danari nama Kelapa yang bengkok, kelapa yang bengkok tersebut dikarena terkena petir dan yang paling kuat adalah yng pertama jadi arti dari Kaluku Tinggu artinya kela yang ditanam oleh Kaluku Tinggu di kampung ini.

saat penjajahan Belanda desa kaluku sudah terdapat pemukiman, desa kaluku tinggu dahulu adalah tempatnya "madika" sehingga dapat dikatakan bahwa dahul desa kaluku tinggu merupakan basis pemerintahan dari kerajaan kecil "Binggi" yang artinya lereng dan gelar untuk rajanya diberikan gelar "magao binggi"

Awal saat masyarakat desa kaluku tinggu menempati desa, masayarakat bekerja sebagai petani dan pertenak dengan komoditas tanam jagung dan padi sawah, pada saat system kerajaan penguasaan tanah dimiliki oleh madika (kerajaan). Setelah memasuki masa kemerdekaan dan kerajaan sudah mulai tidak ada, tanah yang dikuasai oleh madika diberikan kepada desa, dan system pembagianya, tidak diberikan satu – persatu ke pada masyarakat, kememilikanya masih umum dalam arti dikuasai oleh desa, dan untuk warga yng ingin mnegusahakan tanah waktu itu dibebaskan tapi dengan persyaratan tidak boleh dijual, dan bahkan untuk saat ini khusus tanah di wilayah ternak tidak diperbolehkan dilakukan transaksi jual -beli. Tanah sawah yang di desa dahulu, kebanyakan kepemilikan dikuasai oleh madika, sehingga secara turun – menurun diwariskan kepada keturunanya, secara umum masyarakay di desa kaluku tinggu masih asli dari penduduk yang tinggal di wilayah kerajaan Binggi.

Etnis, Bahasa dan Religi

Berdasarkan penuturan tokoh masyrakat yang ada di desa, di Kaluku Tinggu mayoritas etnisnya adlah suku Kaili Ledo, Orang Kaili terdiri atas beberapa sub suku dan menggunakan dialek yang berbeda-beda, maka munculah istilah: Kaili Ledo, Kaili Rai, Kaili Ija, Kaili Unde, Kaili Ado, Kaili Edo, Kaili Tara, dan sebagainya. Dikatakan sebagai Orang Kaili karena adanya kesamaan budaya dan adat istiadat di kalangan mereka, sebagaimana dikemukakan oleh Mattulada (1985:21) bahwa: Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai To Kaili karena adanya persamaan dalam bahasa dan adat istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumber asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua-Franca dalam kalangan semua To-Kaili. argumentasi dan pandangan bahwa meskipun terdiri atas beberapa sub suku, orang Kaili sebenarnya masih memiliki hubungan darah atau berasal dari satu nenek moyang yang sama, hal ini diakibatkan oleh adanya perkawinan antar sub suku Kaili itu sendiri (Natsir dan Haliadi, 2015).

Dalam pergaulan sehari – hari penduduk desa Kaluku Tinggu menggunakan dialek Kaili Ledo, Penggunaan bahasa sehari-hari masyarakat tidak ada aturan formalnya, namun adatistiadat berbahasa juga berkaitan dengan sopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari sehingga bahasa Kaili Ledo juga mengenal bahasa yang sangat halus, bahasa halus, bahasa sehari-hari (bahasa pasar), Bahasa halus bersifat resmi dan sopan contohnya bila seorang menyebut engkau, ia harus memperhatikan apakah yang disebut engkau itu lebih muda, sebaya atau lebih tua daripadanya. Hal ini perlu karena seseorang dapat dianggap sopan bila memanggil engkau pada orang yang lebih muda atau sebayanya dengan sapaan *iko*. Sementara untuk menyebut engkau pada orang yang lebih tua darinya harus menggunakan panggilan *komiu*. Namun, tidak jarang menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan masyarakat di luar desa atau pendatang

Sedangkan , untuk agama yang dianut penduduk desa Kaluku Tinggu mayoritas memeluk agama islam. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan. Selain itu juga keyakinan beragama berkembnag berdasarkan turunan dari orang tua ke anaknya, berikut adalah jumlah penduduk desa berdasarkan agamanaya

Tabel Jumlah Penduduk Berdasar Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	469
2	Protestan	10

Sumber Profil Desa

Kearifan Lokal Desa.

Kearifan lokal yang dahulu pernah diterapkan dan saat ini mulai ditinggalkan adalah tradisi Vunja Mpae, tradisi Vunja Mpae dilaksanakan setiap musim panen tiba, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, dan diyakini juga sebgai bentuk untuk mengharmoniskan hubungan sosial anatar masyarakat serta di dalam keluarga.

Penyenggara teknis dalam upacara Vunja Pae seperti pertama, Bule, predikat seseorang yang dianggab menjadi bule karena mempunyai kekuatan atau kesaktian dalam upacara, tugas Buleadalah mengambil, membawa dan ,membangun, atau menanam tinag vunja berupa bambu, batang pianag atau kelapa, Bule yang bertugas harus keturuanan Pondhohigi, nama ornag yang dianggab sakti dan ornag yang pertama kali yang ditugaskan mengambil bamboo sebagai tiang vunja, kedua, Bayasa penyebuta atau predikat yang disandang seseoarang atau orang – orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan lam gaib, atau arwah leluhur (nenek moyang). Bayasa bertugas pula dalam ritual – ritual yang berkaitan dengan kehidupan di bumi yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kesuburan.ketiga adalah Puepanga, pemilik sawah yang punya hajad dan juga pemilik sawah yang terkena serangan hama, yang juga akan menyiapkan ayam atau kambing 1 ekor yang akan dipersembahkan dalam upacara selain itu juga menyaipaka kalopa, ketupat, bibit padi tiga ikat (Nuraedah,2015)

Tradisi Vunja Mpae, di dalam proses penyelenggaraanya mengandung nilai seperti (Nuraedah,2015) : seperti Kerajian yang maknanya akan membuat seseorang yang malaksanakan tradisi tersebut akan menjadi ulet dan gigih berjuang untuk kesempurnaan,

tolong menolong (Nusiale Pale), Sintuvu (Gotong Royong), Ucapan syukur, Kekeluargaan, memunculkan nilai kearifan lokal

Kepemiminan Desa Kaluku Tinggu Sejarah Kepemimpinan Desa

Desa Kaluku Tinggu dahulu adalah tempatnya "madika" sehingga dapat dikatakan bahwa dahul desa kaluku tinggu merupakan basis pemerintahan dari kerajaan kecil "Binggi" yang artinya lereng dan gelar untuk rajanya diberikan gelar "magao binggi', Sedangkan *Madika* adalah pemimpin berdasarkan kesepakatan adat *pitu nggota* di tanah Kaili pada masa Kerajaan Sigi-Dolo hingga Indonesia merdeka, Berdasarkan asal usul kepemimpinan di Sigi-Dolo terdapat dua kategori besar lembaga yang melahirkan pemimpin yakni dari Libu Nto Ndeya dan pemimpin dari Libu Nu Maradika⁷. Kategori pemimpin dalam Libu Nto Ndeya di Kerajaan Sigi berdasarkan pembagian wilayah yang disebut wilayah adat "pitu nggota." Dalam wilayah ini ada Totua Nu Ngata (orang tua bagian kerajaan), Totua Nu Boya (orang tua wilayah), dan Totua Nu Kinta (orang tua kampung). Pemimpin-pemimpin adat ini yang bertugas dan berfungsi dalam pelaksanaan adat istiadat masyarakat di Kaili Kabupaten Sigi (Natsir dan Haliadi, 2015)

Secara administrative Desa Kaluku Tinggu pernah menjadi bagaian dari desa Pewunu, masyarakat desa Pewunu menikah dengan orang kaluku tinggu serta bertempat tinggal di desa Kaluku Tinggu, sehingga masayarakat desa yang berada di kaluku tinggu saat ini masih ada yang berasal dari desa pewunu. Karena desa Kaluku tinggu awalnya merupakan desa bekas kerajaan ayaitu kerajaan Binggi, sehingga dianggab tidak bagus diperintah oleh desa

-

⁷ Kategori kepemimpinan dalam dewan pemerintahan kagaua atau di Kerajaan Sigi Dolo berdasarkan strukturnya. Kerajaan Sigi Dolo dalam badan kemagauan atau dalam lembaga eksekutif disebut sebagai "Libu Nu Maradika", yang susunannya sebagai berikut: Madika Matua, sebagai Ketua Dewan dan merangkap Perdana Menteri dan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab pada Magau (raja); "Bali Gau menyusun dan merubah segala sesuatu apabila bertentangan dengan adat dan undang-undang negara; Punggava, sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Menteri Dalam Negeri; Galara, sebagai Menteri Kehakiman; dan masih banyak badan – badan laian, Badan-badan inilah yang bertanggung jawabmemutar roda pemerintahan Tanah Kaili. Baik ketua maupun anggota, diangkat dan diberhentikan oleh Magau (raja) atas usul dan persetujuan Baligau (Ketua Pitunggota). (Natsir dan Haliadi, 2015)

lain (desa pewunu), dan magao di Dolo (Diawal kemerdekaan Indonesia, masih ada system magao atau kerjaan yang diakui) memekarkan desa kaluku Tinggu dari desa Induk (desa Pewunu) pada 1958, berikut adalah nama pemimpin yang pernah memimpin desa Kaluku Tinggu:

Tabel Kepemimpinan Desa Kaluku Tinggu

No	Priode	Nama Pemimpin	Keterangan	
1	1958 - 1963	Raja giu	Penunjukan	
2	1963 - 1971	Tombio	Penunjukan	
3	1971 - 113	Lapadio	Penunjukan	
4	1993 - 1995	Aspari Pandan	PJS	
5	1995 - 2005	Sudin M	Definitif/Pemilihan	
6	2005 – 2009	Yusuf Ridwan	Definitif/Pemilihan	
7	2009 -2015	Rusmin Tajirante	Definitive/Pemilihan	
8	2015 - 2016	Yusuf Ridwan PJS		
9	2016 - sekarang	Said Lage Definitif/Pemilihan		

KEPALA DESA
SAID L

SEKRETARIS DESA
YUSUF RIDWAN

TATA USAN ANUSAN
MASWIN

REPALA DESA

SEKRETARIS DESA
YUSUF RIDWAN

HILDAWATI
MASWIN

REPALA DESA

SEKRETARIS DESA
YUSUF RIDWAN
BELIAWAN
BERNA SERSI
PELAYWAN
SARTONO

REPALA DESA
SAID L

REPALA DESA
YUSUF RIDWAN
BELIAWAN
BELIAWAN
MASWIN

REPALA DUSUN
MUNIR

REPALA DUSUN
MUNIR

REPALA DUSUN
MUNIR

Gambar Struktur Pemerintahan Desa

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Kaluku Tinggu

A. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; pemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,korupsi dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan emberikan informasi kepada masyarakat desa.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

C. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa; membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa; mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa; melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

D. Pelaksana Teknis Desa:

1) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Tugas Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa; pelaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa; melaksanakan pengelolaan administrasi umum; sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; mengelola administrasi perangkat desa; mempersiapkan bahan-bahan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

2) Kepala Urusan Pemerintah (Kaur Pem)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pem) adalah membantu kepala desa

melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah melaksanakan administrasi kependudukan; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa; melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan; melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

3) Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat; melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan; mengelola tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Kepemimpinan Tradisonal

Lembaga adat Desa Kaluku Tinggu menrupakan wujud dari kepemimpinan tradisional, walau berada di luar struktur pemerintahan desa, Lembaga adat desa Kaluku Tinggu dalam melaksanakan tugasnya bersinergi dengan pemerintahan desa. Secara struktur kepemimpinan Lembaga adat terdiri dari ketua, sekretaris , bendahara serta anggota laintujuan terbentuknya Lembaga Adat, tidak lain untuk mengayomi persoalan adat di desa,

umumnya persoalan rumah tangga, pertengkaran antar warga maupun dengan warga di luar desa serta persolan sosial lainya.

Lembaga adat dalam proses pengambilan keputusannya selalu mengedepankan musyawarah dengan tetap memgang teguh kekeluargaan dalam setiap perkara yang diatanganinya. Perkara yang ditangani oleh lembaga adat yang umumnya adalah masalah sosial, seperti masalah rumah tangga, pertengkaran fisik, maupun pertengkaran yang diakibatkan oleh perselisihan atas hak seperti tanah, maupun sumber daya fisik lainya. Namun saat perkara tersebut tidak dapat diselesikan di Lembaga adat tingkat desa, kemudian dapat diselesaikan ke tingkat Lembaga adat yang ada di Kecamatan.

Proses pengambilan keputusan tersebut melalui sidang Lembaga adat, yang biasanya diadakan di desa, perkara yang di sidangkan di Lembaga adat dapat berupa pengajuan ataupun tidak, misal saat ada warga yang ingin mengajukan perkaranya (sebagai pengugugat) biasanya memberikan sejumlah uang kepada Lembaga adat sebagai biaya perkara, dan pada tahab berikutnya Lembaga adat akan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa yaitu pengugat dan tergugat, diamana masing – masing akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saat pihat yang dianggab sebgai tergugat tidak menerima gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, perkara tersebut kemudian akan dibawa ke Lembaga adat tingkat kecamatan, dan saat pihak tergugat mengakui kesalahanya kemudian Lembaga adat akan memutuskan pemberian saksi sesuai dengan berat kecilnya kesalahan yang diperbuat.

Selain menangangi permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada di desa, Lembaga adat di desa juga dianggab sebgai bagian dari ritual atau hajatan yang dilakukan oleh masyarakat, misalkan saat ada warga yang akan menikah atau melakukan proses lamaran, di desa kaluku tinggu maka harus memberi informasi ke Ketua adat.

Mekanisme Penyelesian Konflik dan Pengambilan Keputusan di Desa

Dalam setiap penyelesian konflik atau perselisihan yang terjadi di desa , pada prinsipnya mengedepankan system musyawarah dan mendahulukan prinsip kekluargaan, menurut penuturan warga perselisihan yang terjadi di desa Kaluku Tinggu belum ada yang

sampai pada penyelesaian di tingkat kepolisian maupun hingga ke pengadilan. Umumnya perselisihan yang muncul diakibatkan oleh permasalahan kenakalan remaja, sebelum sampai ke tingkat desa, perselisihan diselesaikan di tingakat dusun atau RT, misalkan ada waraga yang di dapat melakukan tindak pencurian, penyelesaian di tingakat dusun atau RT, langsung pada pokok perkara dan saat warga yang melakukan pencurian tersebut mengakui tindakanya, maka diwajibkan hanya mengganti barang yang telah dicuri. Selain perkara yang diselesaikan melalui lemba formaldesa juga ada perkara yang diselesaikan secar informal dengan melalui Lembaga adat seperti yang dijelaskan diatas.

Sedangkan untuk mekanisme pengambilan keputusan di desa, misalkan terkait penyusunan RKPdes maupun penyusunan APBdes di des Kalulu Tinggu dialkukan sesuai aturan yang terkait, Undang - Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan acuan untuk bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan segala bentuk kepentinganya dalam setiap kebijakan yang akan diambil di desa sehingga kebijakan tersebut lebih partisipatif sifatnya. UU Desa telah memberikan kerangka normatif dan Institusional bagi pelaksanaan demokrasi desa yang mencangkup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, deliberasi, representasi dan partisipasi (Shohibudin, 2015).

Proses tersebut dimualai dari tingakat dusun (rapat ditingkat dusun) untuk menentukan program yang akan diajukan, setelah itu diadakan musyawarah di tingkat desa untuk mengambil skala prioritas pengajuan program yang diajukan oleh setiap dusu melalui lembaga Musyawarah Desa (MD). Pelaksanaan MD salah sataunya dalam pembuatan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah) yang kemudian menjadi dasar untuk penetapan APBDes (Anggran Pendapan Belanja Desa). Keberadaan lembaga MD yang ditetapkan oleh UU Desa sebagai sebuah kelembagaan forum deliberatif untuk penyaluran aspirasi, kepentingan dan kontrol dari warga desa. Berdasarkan pasal 54 yang terdapat di UU Desa, menyebutkan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan MD, dimana MD

merupakan forum permusyawaratan yang bersifat strategis⁸ dalam penyelengaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaanya MD diikuti oleh Badan Musyawarah Desa, dan unsur masyarakat desa. Berikut ini adalah diagram hubungan antar –kelembagaan dalam pemerintahan desa sesaui dengan UU Desa

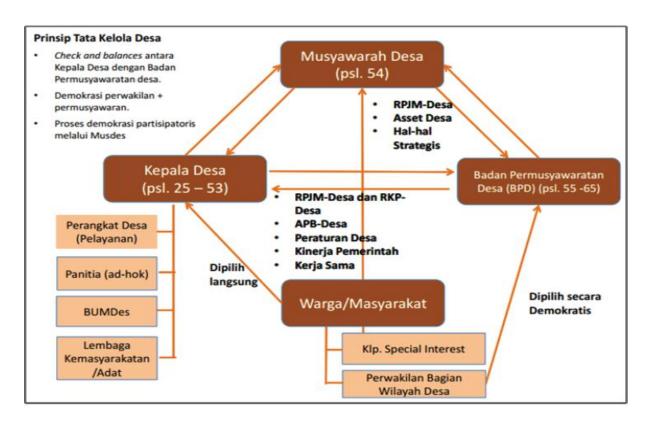


Diagram Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa

(Zakaria, 2014)

Kecenderungan Perubahan Di desa

Di Sektor Infarstruktur jika dilihat kecenderungan perubahanya, dengan pengguanaan Dana Desa, sejak tahun 2014 hingga 2019 terjadi perubahan yang signifikan dari tahun 2000-an hingga 2010 awanyal jalan desa masih berupa batu dan kerikil namun saat memasuki anatar

⁸ Hal yang bersifat strategis seperti, penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa (Pasal 54 ayat 2 UU Desa)

2011 an hingga 2019 sudah terdapat pengaspalan jalan, untuk keberadaan jalan usaha tani atau jalan kantong produksi selain mangalami perbaikan dari segi kwalitas dari jalan setapak yang berupa tanah dan krikil di tahun 1990-an hingga 2000, juga mnegalami pelebaran dan perbaiakn kwalitas ddengan dialakukan pengerasan serta rabat beton di tahu 2000 an hingga 2019. Sementara untuk fasilitas Pendidikan yang awalnya hanya ada fasilatas Pendidikan seolah Dasar, kini sudah terdapat fasilitas Pendidikan tingkat TK dan SMP dan untuk fasilitas kesehatan yang awalnya di tahun 1990 an tidak terdapar bangunan untuk fasilitas Pendidikan dan di priode 2000 an – hingga sekarang sudah terdapat polides namun untuk Gedung posyandu sampai saat ini belum ada, dan setiap kegiatan posyandu masih di rumah warga.

Sedangkan untuk sector Komoditas pertanian khususnya padi mualai berkurang sejak tahun 2000 -an karena susahnya air, dan sebagain warga memilih untuk menggatinya menjadi tanaman jagung atau kacang tanah serta ketimun. Sedangkan untuk tanaman jagung pada priode tahun 2010 hingga sekarang mengalami kenaikan, selain suplai bibit dan pupuk dari pemerintah, karena tanaman jagung bagi masyarakat dianggab tidak begitu sulit perawatanya di bandingkan dengan tanaman padi, dan tanaman jagung juga tidak membutuhkan asupan air yang tidak terlalu banyak. Untuk tanaman hortikultura cenderung bersifat stagnan ealau ada peningkatan tidak signifikan. Disisi lain walau terjadi penurunan produksi padi , konsumsi masyarakat atas beras masih tinggi diabndingkan yang lain, berikut adalah kecenderungan perubahan yang ada di Desa Kaluku Tinggu.

Tabel Kecenderungan Perubahan di Desa Kaluku Tinggu

Uraian	1990 - 2000	2000 – 2010	2010-2019	Keteranagan							
Infrastuktur											
Jalan desa	Masih berupa batu dan krikil	Masih berupa batu dan krikil	Pengaspalan	Mennggunakan dana desa							
Jalan Kantong Produksi	Masih berbentuk jalan setapak berupa tanah	Pengerasan dan ada pelebaran 3 m	Pengerasan dan rabat beton	Menggunakan dana APBDEs (rabat beton) menggunakan dana APBN (pengerasan)							
Fasilitas Pendidikan	SD (2 unit)	SD (2 unit), TK (I unit), Paud (1 unit, TPA (1 unit)	SD (1 unit), TK (I unit), Paud (1 unit, TPA (1 unit)	Pada tahun 90-an bangunan sekolah sudah permanen dan lantai semen, dan di tahun 2000n ada penambahan fasilitas Pendidikan PAUD dan TK dan lantai sudah keramik, pada tahun 2012 ada pemekaran desa menjadi desa balaroa pewunu dan SD tinggal 1 unit							
Fasilitas Kesehatan	Posyandu (belum terdapat Gedung)	Polides dan posyandu , Posyandu (belum terdapat Gedung)	Polides dan posyandu , Posyandu (belum terdapat Gedung)	Pembangunan Polides menggunakan dana APBD							
Kantor Desa	Permanen, semen	Permanen, semen	Permanen, kramik	Perbaikan bangunan menggunakan dana APBDES							
		Komodiata	s Pertanian	,							
Padi	5	4	4	Susahnya air menjadi penyebab masyarakat mengalihfungsikan lahan padi ke jagung, dan kacang tanah dan ketika debit air berkurang tenaga kerja atau petani beralih profesi menjadi buruh bangunan							
Jagung	4	4	5	Karena tanaman jagung dianggab lebih mudah dalam hal perawatan dan tidak membutuhkan banyak air							
Ketimun	1	2	3	Mudah dijual, panen cepat dan biaya produksi sedikit							
Kacang Tanah	2	2	2	Bibitnya mahal, pekerjaannya dianggab agak sedikit rumit, dan biaya produksi mahal							

Lombok	1	2	2	Biaya pemeliharaan terlalu tinggi (obat dan tenaga kerja)		
			Bencana			
Gempa Bumi				Saat gempa bumi yang terjadi di tahun 90 an dan 2000 an awal tidak terdapat warga yang mengungsi jkarena gempa tidak berdampak signifikan Dan ditahun 2018 gempa mengakibatkan masyrakat mengungsi di lokasi desa selama 4 bulan, satu minggu sebelum datangnya bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat memanfatkan sisa – sisa makanan yang tersedia dan juga memanfaatkan hasil kebun (pisang, ubi, jagung), akibat gempa terdapat kurang lebih 8 rumah warga yang rusak berat, sedangkan yang rusak ringan kurang lebih 60 rumah, psaca gempa sekitar 1 bulan kemudian masyrakat mulai bekerja di kebun (berkebun), gempa juga merusak saluran irigasi yang ada di dusun 2 yang berdampak terhadap air tidak dapat mengalir ke sawah		
Longsor				Longsor terjadi di wilayah desa yang berada di Kawasan hutan (lereng gunung) dampaknya mengangu aliran air yang menuju ke persawahan masyarakat		
			Pola Konsumsi			
Jagung	2	2	2	Masyarakat lebih suka mengkonsumsi beras sedangkan jagung untuk selingan		
Beras	5	5	5	Karena dianggab sebgai makanan pokok		
Ubi	1	1	1	Hanya sebagai makanan tambahan		
Makanan Instan	1	3	3	Karena akses atau jalur disrtubusinya makanan insatan lancer		

Sumber Diskusi

Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaluku Tinggu (APBDes) berpedoman pada beberapa produk hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kabupaten, Adapun produk hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut

 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran 		
 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 	1.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di
 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 		Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 		Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 		
 Nomor 5495) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 	2.	Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 		Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Keuangan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 		Nomor 5495)
 Keuangan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 	3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 		
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Redailgan Desa,
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Peraturann Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		Indonesia Nomor 5864);
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);		
tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);	5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
		Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran		tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
3	6.	Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran
	-	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23);

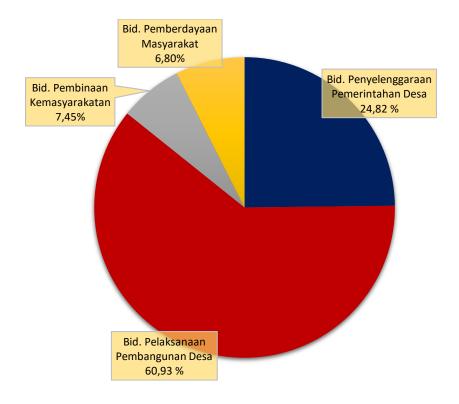
Pasal 9 ayat 1 Pemendagari No 113/2014 menyebut bahwa, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari 3 (tiga) komponen, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan transfer dan pendapatan lain – lain , sedangkan sumber pendapatan dana desa Kaluku Tinggu hanya meliputi pendapatan transfer dari APBN (Anggran Pendapatan Belanja Negara) atau dari pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Dana Desa dan dari Pemeritah kabupaten Sigi dari bagi hasil Pajak dan redistribusi dan terakhir juga dari pemerintah kabupaten Sigi melalui Alokasi Dana Desa. , sedangkan untuk arah pembangunan desa Kaluku Tinggu pada tahun 2019 lebih focus pada pembangunan fisik, ini dapat dilihat bahwa belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa mendapat porsi terbesar dari pada yang lain, Berikut adalah perincianya.

Tabel Pendapatan dan Belanja Desa 2019

Pendapatan Desa	Jumlah (RP)
Pendapatan Transfer	1.142.791.814.83
Jumlah Pendapatan	1.142.791.814.83
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	283.645.114.83
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	696.282.112.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	77.703.800.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	85.160.788.00
Jumlah Belanja	1.142.791.814.83

RKP Desa 2019

Grafik Belanja Desa 2019



Asset Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah (Permendagri No 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa) berikut adalah beberapa asset desa yang dimiliki oleh Desa Kaluku Tinggu.

Asset Tanah Desa

No	Peruntukan	Luas	Letak	Status Tanah
1	Lahan Ternak	± 75 Ha	Dusun I	Hak Milik Desa
2	Tanah PKK	± 1/2 Ha	Dusun I	Hak Milik Desa

3	Kantor Desa	± 450	Dusun II	Hak Milik Desa

Sumber Wawancara

Asset Bangunan Desa

No	Jenis / Nama Barang	Kondisi Banguanan	Kontruksi		
			Bertingkat	Beton	
1	Kantor Desa	Baik	Tidak	Ya	
2	ТРА	Baik	Tidak	Ya	
3	Polides	Baik	Tidak	Ya	
4	Kantor LSPBN	Baik	Tidak	Ya	

Sumber Wawancara

Aset Bergerak Desa Kaluku Tinggu

Aset	Peruntukan	Keterangan
20 ekor Sapi	Sarana Peningkatan Ekonomi Masyarakat	20 ekor sapi tersebut dirawat oleh masyarakat, dan saat sapi sudah beranak, kemudian sanak sapi akan menjadi hak milik warga yang merawat, kemudian induknya akan dialihakan atau diepelihara oleh yang
		lain

Sumber Wawancara

Analisis Gender

Penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus responsif gender, hal ini sesuai dengan Interuksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. Penngertian PUG

berdasarkan Pemendagri No 15 Tahun 20089 tentang Pedoman Umum Pelakasanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada pasal 1 ayat 1, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Sedangkan Gender adalah "konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (pasal 1 ayat 2) " dan analisis gender "mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa (pasal 1 Ayat 5)".

Untuk aktivitas di sector pertanian di dalam keluarga peran laki – laki dewasa lebih dominan jika dibandingkan dengan perempuan dewasa, termkasud aktivitas pertanian diluar keluarga seperti pekerjaan menjadi buruh tani umumnya dilakukan oleh laki – laki dewasa, sedangkan untuk aktivitas yang berkaitan dengan kerja – kerja di sector domestic, kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan dewasa dan anak, aktivitas tersebut misalkan mencuci, mengasuh anak, bersih – bersih rumah sedangkan laki – laki desawa dan anak – anak biasanya hanya sekedar membantu. Sedangkan peran laki – laki dewasa maupun anak –anak lebih dominan saat berkaitan dengan aktivitas pertanian dan posisi perempuan bisa dikatakan membantu, namun untuk mengurus hewan ternak laki – laki dan perempuan saling berbagi peran, untuk aktivitas ekonomi lainnya seperti berdagang (menjaga warung) umumnya dilakukan oleh kaum perempuan, sehingga dapat dikatakan aktivitas perempuan lebih sering berada di rumah dibandingkan dengan laki – laki.

⁹ Peraturan Pelaksana Inpres 9/2000 dan Penganti Pemengari 132/2003 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Tabel Aktivitas Keluarga

	KEGIATAN DALAM KELUARGA				AKTIVITAS DI LUAR KELUARGA							
KEGIATAN		L			Р			L			Р	
	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP
Menanam (Padi,	D				D		D				D	
Jagung, Kacang)												
Mencuci		D		DA						D		
Merawat anak		DA		DA						D		
Bekerja diluar	D			D								
rumah (kantor/												
pegawai												
Peternakan	DA				DA		D				D	
Memasak		D		DA								
Memperbaiki	D						D					
rumah												
Membersihkan		D		DA						D		
rumah												
Belanja/jual/kepasar				D						D		
Merawat tanaman	D				D		D				D	

Keterangan: UM = Umum, KD = Kadang – Kadang, TP (Tidak Pernah)

D = Dewasa (15 tahun ke atas), A = Anak – Anak (15 tahun ke bawah)

Sumber Diskusi dan Wawancara

Bertani meruapakaan pekerjaan utama warga desa Kaluku Tinggu, dan aktivitas Bertani lebih dominan dilakukan oleh kaum laki – laki, hal ini kemudian berdampak pada akse atau pemanfaatan tanah, laki - laki lebih dominan dalam pemanfaatn /akses terhadap tanah, sedangkan untuk control atas tanah walau laki – laki juga lebih besar dalam menetukan namun perempuan juga diajak bermusywarah misalkan saat harus melakukan transaksi jual beli tanah, sedangkan untuk akses pemanfataan sumber daya fisik lainya seperti uang chas, karena perempuan di desa Kaluku Tinggu sebagai pengurus kebutuhan keluarga, maka akses pemanfaatan terhadap uang chas lebih besar dibandingkan dengan laki – laki, sedangkan untuk aksen non fisik seperti Pendidikan, untuk perempuan dan laki – laki dapat diakatakan tidak ada perbedaan, namun untuk menentukan atau control peran laki – laki khususnya ayah lebih besar daripada ibu, misalkan terkait apakah Pendidikan anak dilanjutkan atau tidak, karena peran laki – laki dainggab sebagai kepala rumah tangga. Mengenai akses dan kontrol dalam analisis gender di Desa Kaluku Tinggu terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Akses dan Kontrol Dalam Keluarga

Indikator	Akses	(%)	Kontrol (%)		Keterangan				
	L	Р	L	Р					
Sumber Daya Fisik									
Lahan sawah	70	30	60	40	Karena laki – laki dianggab sebagai kepala keluarga				
Lahan Ladang	70	30	60	40	Karena laki – laki dianggab sebagai kepala keluarga				
Cash/uang	40	60	50	50	Terdapat musywarah sebelum mengambil keputusan				
		•	Su	imber D	aya Non Fisik				
Kebutuhan dasar (sandang,pangan,	40	60	40	60	Karena perempuan dainggab lebih mampu dalam				

papan)					mengelolah kebutuhan keluarga
Pendidikan	50	50	60	40	Kareana seoarang ayah dianggab sebgai tumpuhan keluarga
Kesehatan	50	50	50	50	Terdapat musyawarah sebelum mengambil keputusan
Kekuasaan politis	50	50	50	50	Terdapat system musyawarah
Lembga desa	90	10	90	10	Karena mayoritas Lembaga di desa di dominasi oleh laki – laki

Sumber Diskusi dan Wawancara

Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga dapat diartikan sebagai penda[atan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga mauapun anggota – anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari jasa factor produksi tenaga kerja (upah, gaji, bonus, keuntungan dan lain – lain (BPS). Berdasar atas data profil desa Kaluku Tinggu pada 2018, dari total jumlah penduduk Kaluku Tinggu terdapat 22,55 persen atau 108 jiwa jumlah penduduk yang bekerja, dimana jumlah laki – laki yang bekerja sebesar 52 persen sedangkan perempuan 48 persen, berikut adalah jumlah penduduk desa Kaluku Tinggu berdasarkan jenis pekerjaanya

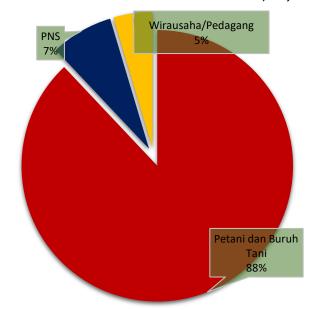
Tabel Jumlah Penduduk Berdasar Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan utama	L (jiwa)	P (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Petani/ pekebun	50	45	95
2	Pegawai negeri sipil	3	5	8
3	Wirausaha/pedagang	2	3	5
	Total	56	52	108

Sumber Profil Desa 2018

Jika dilihat berdasarkan table jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan diatas terdapat 88 persen dari penduduk yang bekerja di desa Kaluku Tinggu bekerja sebagai petani dan buruh tani, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga penambahan pendapatan keluarga tergantung pada pengelolahan tanah, dan persentase jumlah penduduk laki – laki yang bekerja di sektor pertanian lebih besar dibandingkan perempuan 5 persen.

Selain pekerjaan di sector pengelolahan tanah, di desa Kaluku Tinggu, ada 5 persen penduduk dari jumlah penduduk yang bekerja, untuk menunjang pendapatan keluarga dengan bekerja di sector wirausaha/pedagang dengan menjual kebutuhan sehari – sehari penduduk seperti mendirikan kios di depan rumah atau lokasi yang tidak jauh dari rumah, dan yang bekerja sebagai pedagang (toko) umunya adalah perempuan, selain berdagang jual beli kebutuhan sehari – hari terdapat juga warga desa yang melakukan kegiatan ekonomi jual beli komoditi hasil produksi pertanian.Berikutnya ada Sedangkan sisanya sekitar 7 persen bekerja bekerja di sector formal sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik sebagai aparatur desa maupun tenaga. Untuk lebih jelas mengenai komposisi mata pencaharian warga Desa Kaluku Tinggu dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar Grafik Jumlah Penduduk Berdasar Pekerjaanya

Dalam memenuhi kebutuhan hidup serta untuk menambah pendapatan keluarga, penduduk desa Kaluku Tinggu selain mempunyai pekerjaan utama juga terdapat pekerjaan tambahan, pekerjaan tambahan yang dominan dilakukan oleh warga adalah sebgai Buruh Harian Lepas (BHL) seperti buruh bangunan maupun buruh tani. Pekerjaan sebagai petani di desa Kaluku Tinggu tidak dapat dikalkulasi secara tepat penghasilan yang diterima dalam setiap bulanya, karena penghasilan di dapat saat musim panen tiba misalkan untuk tanaman musiman seperti padi sawah, pendapatan diterima 3 – 4 bulan sekali begitupun juga komoditas tanaman jagung, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdapat petani yang bekerja sebagai BHL bangunan di luar desa ataupun menjadi buruh tani. – pekerjaan menjadi BHL dilakukan oleh petani yang umumnya hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pendapatan yang cenderung bersifat tetap adalah penduduk yang bekerja di sector pekerjaan formal seperti PNS yang pendapatanya dihitung berdasar atas gaji dalam satu bulan, namun selain bekerja di sector formal, terdapat juga yang kemudian bekerja sebagai petani, dengan cara menggarapkan tanahnya pada orang lain yang kemudian menggunakan sistem bagi hasil dengan petani penggarap, berikut adalah gambaran umum pendapatan penduduk desa:

Tabel Pendapatan Warga Desa

No	Keluarga	Pekerrjaan Utama	Pekerjaan Tambahan	Pendapatan rata – rata/bulan (Rp)
1	Keluarga A	Petani/Pekebun	BHL (Buruh Harian Lepas)	2.000.3.5000.00
2	Keluarga B	Pedagang Kecil (Kios)	Petani/Pekebun	1.000.000 – 1.500.000
3	Keluraga C	PNS/Karyawan Swasta	Petani/Pekebun	3.000.000- 4000.0000

Sumber Diskusi dan Wawancara

Petani/Pekebun

Petani yang terdapat di desa Kaluku Tinggu, jika dilklasifikasikan berdasar hubungan dengan lahan yang diusahakan, maka dapat dikategorikan sebagai berikut;

Pertama, Petani pemilik penggarab, ialah petani yang mengusahakan lahanya sendiri atau digarab sendiri dan status lahan yang digarabnya adalah lahan milik.

kedua, petani penyakap (Penggarab), petani yang menggarab tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil, Petani dengan system bagi hasil yang terjadi di desa Kaluku Tinggu umumnya masih terikat kekeluargaan, sehingga penetuan bagi hasilnya tidak ada kepastian yang tepat, namun ada dengan mekanisme 1 (satu) banding 2 (dua): misalkan dalam 1 ton 700 Kg penggarab dan 300 kg ke yang punya tanah, besarnya bagian petani penggarab, karena semua ongkos produksi ditanggung oleh petani penggarab dan termaksud saat gagal panen, petani penggarap yang harus menanggung sendiri kerugian tersebut.

Ketiga, Petani dipanja (kontrak), petani yang menggarap lahan usaha tani milik orang lain dengan system sewa (panja), bertani dengan system panja sanagat sulit ditemukan kini di desa, untuk system kontraknya sangat tergantung komitmen dari pihak yang berasangkuatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, setelah masa kontrak penjanjian habis, penguasaan tanah akan kembali pada pemilik tanah

Ke-empat Buruh Tani, Petani yang menjadi buruh tani pada umumnya adalah petani pemilik lahan (yang ahanya sempit atau kurang dari 0,5 Hektar/petani gurem) dan petani yang tidak memimiliki lahan usaha tani yang bekerja ke lahan petani pemilik, petani dipanja, untuk buruh tanai upah yang didapat berupa uang, misalkan untuk buruh tani bajak dengan sapi, dalam satu harinya di upah Rp. 100.000 , upah untuk bersiram saat memasuki masa perawatan besarnya Rp 80.000 perhari dan upah untuk panjat kelapa sebesar 10.000 dalam setiap satu pohonya.

Sedangkan, jika dikwalifikasi berdasar jenis tanamanan yang dibudidayakan di desa Kaluku Tinggu Terdapat dua jenis tanaman yang diusahakan oleh petani desa Kaluku Tinggu, yaitu jenis tanaman musiman seperti padi sawah, jagung, komoditas hortikultura dan juga tanaman parennial (tahunan) yang umumnya di tanam warga desa seperti kakao maupun kelapa, berikut adalah varietas tanaman Padi Sawah yang di usahakan petani.

Tabel Varietas Padi Sawah desa Kaluku Tinggu

Uraian	Santana	Ciherang	Ampadua	Pulut Hitam (tinggaloko)	Polo Jawa	Padi Merah (pulei)
Umur Panen	70 hari	3 bulan	4 bulan	4,5 bulan	4,5 bulan	4,5 bulan
Di konsumsi/ dijual	Di Jual dan di Konsumsi	Di Jual dan di Konsumsi	Di Jual dan di Konsumsi	Hanya di jual	Di Jual dan di Konsumsi	Di Jual dan di Konsumsi
Hasil per- Hektar	300 blak (I black 7-8 liter)	300 blak	400 blak	160 blak	160 blak	300 blak
Masalah	Kurang anakanya, ketergantungan terhadap pupuk, penggerek batang, ketersedian air	Kurang anakanya, ketergantungan terhadap pupuk, penggerek batang, ketersedian air	Ketergantunga n terhadap pupuk, penggerek batang, dan ketersedian air	Ketergantungan terhadap pupuk, penggerek batang, dan ketersedian air	Ketergantungan terhadap pupuk, penggerek batang, dan ketersedian air	Ketergantungan terhadap pupuk, penggerek batang, dan ketersedian air
Yang tanam di desa*	4	2	3	1	1	1
Harga	8000/liter beras	8000/liter beras	10.000/liter beras	25.000/lier	20.000/liter	25.000/liter
Catatan	Ketersediaan air menjadi penting bagi masyrakat untuk menanam	Ketersediaan air menjadi penting bagi masyrakat untuk menanam	Ketersediaan air menjadi penting bagi masyrakat untuk menanam	Ketersediaan air menjadi penting bagi masyrakat untuk menanam	Ketersediaan air menjadi penting bagi masyrakat untuk menanam	Ketersediaan air menjadi penting bagi masyrakat untuk menanam

fUntuk mengtahui berapa banyak varietas padi yang ditanam di desa dengan menggunakan system point, antara 1-5 dan 1 paling sedikit

Sumber Diskusi dan Wawancara

Padi sawah merupakan tanaman musiman yang banyak diusahakan oleh petani, selain untuk dijual juga dikonsumsi, khusus untuk jenis varietas padi pulut hitam hanya untuk dijual, terdapat dua jenis varietas padi yang ditanam di desa Kaluku Tinggu yaitu varietas santana dan empadua, selain karena ketersedian bibit juga hasil panennya lebih besar untuk varietas padi empadua yang bisa mencapai 400 blak gabah, sedangkan yang menjadi masalah utama untuk penanaman padi adalah ketersedian air, di desa Kaluku Tinggu terdapat saluran irigasi yang aliran airnya bersala dari sungai wera namun, pemanfaatan air melalui irigasi untuk setiap dusun I maupun dusun II harus bergiliran dalam 6 bulan sekali, saat lahan sawah yang berada di Dusun I mendapatkan jadwal aliran air, 6 bulan kemudian aliaran air diperuntukkan untuk lahan sawah dusun II. Berikutnya yang menjadi kendala petani untuk peningkatan produktifitas tanaman padi adalah serangan Organisme Pengangu Tanaman (OPT) seperti hama penggerek batang yang menyerang tanaman padi dari semua fase pertumbuhan dari fase pembibitan, fase anakan hingga ke fase pembungaan, selain itu ketergantungan terhadap keterdian atau penggunaan pupuk khususnya pupuk kimia sangat berpengaruh terhadap hasil panen yang kemudian berdampak pada meningkatnya biaya sarana produksi (saprodi), penggunaan biaya Saprodi seperti pupuk terdapat dua jenis, umumnya petani menggunakan pupuk anorganik seperti KCL atau pupuk MOP (Muriate Of Potash) yang memiliki unsur Kalium (K) dan Clorida (CL) yang bagi petani Kaluku Tinggu digunakan untuk memperkuat akar dan memperpadat isi dan kedua adalah pupuk anorganik atau pupuk kimia UREA, merupakan jenis pupuk yang mengandung Nitrogen (N), menurut petani penggunaan pupuk Urea dapat meningkatkan kesuburan tanah, daun dan batang, dalam satu Hektarnya, penggunaan pupuk KCL dan Urea yang digunakan petani adalah 1 banding 3, misalkan KCL nya 1 karung (50 Kg) untuk Ureanya 3 karung (150 Kg). Biaya Saprodi lainya adalah penggunaan Hebisida untuk penanggulangan Gulma, jenis Herbida yang digunakan seperti Herbisida sistemik dan kontak, dalam satu Hektarnya penggunaan Herbisida mencapai 1 liter, penggunaan Herbisida sangat tergantung dengan pertumbuhan gulma yang ada, khususnya digunakan saat memasuki persiapan lahan atau pada saat perawatan.

Berikutnya tanaman jagung yang merupakan tanaman utama di desa selain padi sawah, Jagung varietas lokal (Jagung Biaha) menjadi komoditas tanaman jagung yang paling banyak di usahakan petani Kaluku Tinggu, karena bibit yang mudah di dapat, selain varietas jagung biaha juga terdapat varietas jagung hibrida dan jagung manis, untuk melihat lebiih detail terkait varietas tanaman Jagung yang diusahakan oleh petani di desa Kaluku Tinggu dapat dilihat dari table di bawah ini

Tabel Varietas Tanaman Jagung di Desa

Uraian	Dale Biaha (Jagung merah)	Jagung Hibrida	Jagung Manis
Umur Panen	3 bulan	4 bulan	2.5 bulan
Di konsumsi/dij ual	Dijual dan konsumsi	Dijual	Dijual
Warna Biji	Merah	Kuniong	Kuning
Hasil per- Hektar	8 ton	10 ton	7 karung dalam 1/4 Ha
Masalah	Hama (Penggerek batang dan buah), Kamarau debit air kecil	Saat musim kemarau debit air kecil	Hama (Penggerek batang dan buah), Kamarau debit air kecil
Yang tanam di desa*	4	3	1
Harga	3500/perliter	3.300 prkilo	1000/pertongkol (200.000 perkarung)
Catatan	Perbandingan harga di pasar melonjak lebih tinggi daripada harga di petani	Harga tidak stabil	Harga eceran lebih mahal dibandingkan dengan harga dari petani

^{*}Untuk mengetahui berapa banyak varietas jagung yang ditanam di desa dengan menggunakan system point, antara 1 -5 dan 1 paling sedikit

Sumber Diskusi dan Wawancara

Untuk kebutuhan saprodi sama sperti usaha petani padi selain pupuk juga pengeluaran herbisida sistemik maupun kontak, namun untuk tanaman jagung dalam satu Hektarnya membutuhkan 200 Kg Urea dan 100 Kg KCL kedua pupuk kimia tersebut dicampur dengan takaran saat menngunakan 5 liter Urea maka dibutuhkan 1 liter KCL, sedangkan untuk biaya tenaga kerja untuk usaha tanaman padi saat harus menggunakan tenaga kerja dengan system upah untuk penanaman, pembersihan lahan, perawatan dan panen, umumnya untuk setiap pekerja dalam satu hari Rp 70.000 yang bekerja selama 8 jam.

Dalam setiap aktivitas pertanian padi maupun jagung, setiap rumah tangga petani terjadi pembagian peran antara laki – lakidan perempuan dalam setiap tahapanya (persiapan lahan, tanam, perawatan maupun panen, dan berikut adalah pembagian peran antara laki – laki dan perempuan dalam usaha tani padi dan jagung.

Tabel Tahapan dan Pembagian Peran Laki – Laki dan Perempuan dalam Usaha Tani Padi

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan		agian ran	Keterangan
			L	Р	
Nopajeko	Pelaksanaan dilakukan sebelum penyemaian benih padi	Persiapan lahan	√		Proses penggemburan tanah dengan menggunakan tractor
Nosuaraka uve	Dilakuakan setelah Nopajeko	Persiapan lahan	√		Memasukkan air ke sawah, setalah itu dibiarkan selama satu sampai dua hari
Nosalaga	Dlakuakan setelah Nosuaraka uve	Persiapan lahan	√		Meratakan tanah yang sudah basah atau becek
Nosavu	Dilakukan biasanya secara bersamaan dengan proses persiapan lahan	Penyemaian	✓		Benih di tabur di lahan yang berbeda dengan lahan yang diperuntukkan untuk menanam
Nonana	Dilakukan setelah 25 hari	Penanaman		√	Menanam bibit padi yang sudah

	peneyemaian benih				disemai ke lahan (sawah)
Nosomprot	Setelah 3 hari sampai satu minggu	Perawatan	√		Proses penyemprotan menggunakan logram
Nopupu I	Dilakukan setelah umur tanaman 2 minggu	Perawatan	√		Pupuk (basanya urea dan KCL dicampur) langsung ditabur ke padi
Novavu	Dilakukan setelah di pupuk	Perawatan	√		Mencambut rumput,
Nopupu II	Dilakukan setelah umur tanaman satu bulan setengah	Perawatan	√	\	Pupuk (basanya urea dan KCL dicampur) langsung ditabur ke padi, supaya isi padi padat
Norone	Dilakukan sebelum panen	Perawatan	√	\	Menjaga tanaman padi yang akan panen dari serangan hama (burung)
Nosangki	Dilakuakan setalah 4 bulan dari masa tanam	Panen	√		Menyabit padi dengan menggunakan arit
Nompasi romu	Dilakukan setelah padi disabit	panen	√	\	Mengumpulkan padi yang telah disabit
Nobante	Dilakuakn setelah padi dikumpulkan	panen	√		Memisahkan biji padi dari tangkainya dengan cara dbanting ke Dopi yang beralaskan terpal
Novaro	Dilakukan setelah biji padi terpisah dari tangkainya	panen	√	√	Memisahkan biji padi yang bagus dengan biji padi yang rusak dengan menggunakan baki
Nompovai	Dialkukan setelah bji pad yang bagus dan rusak dipisahkan	panen	V	V	Menjemur biji padi yang sudah diplih beralsakan terpal atau langsung di lanta yang bersemen, nompovai biasanya dilakukan selama 2 har saat kondsi cuaca normal

Nogili	Dalakuakn setelah biji padi di keringkan	panen	√	√	Memisahkan kulit biji padi agar menjadi beras dengan menggunakan mesin penggiling padi, yang mengangkat laki – laki
					padi, yang mengangkat iaki – iaki

Sumber Wawancara dan Diskusi

Tabel Tahapan dan Pembagian Peran Laki -Laki dan Perempuan dalam Usaha Tani Jagung

Uraian	Pelaksanaan	Tujuan		bagian eran	Keterangan
			L	Р	
Nosoe	Dua minggu sebelum tanam	Pembersihan lahan	V	√	Tapi umumnya perempuan, Berparas atau memotong rumput dengan arit atau mesn pemotong rumput
Nopuji	Dilakukan setelah Nosoe	Pembersihan lahan	√	√	Menyemprot rumput dengan pestisida
Nobede	Setelah pembersihan lahan	Persiapan lahan	√		Membuat bedeng, dan utuk alran air
Notuda	Dlakuakan setelah pembersihan lahan dan persiapan lahan selesai	Penanaman	√	√	Dbuatkan dahulu lubang tanam, kemudian dtaruh bibt jagung rata - rata 3 - 4 biji, waktu bertanam masyarakat menunggu hari baik, biasanya berkonsultasi kepada orang tertentu
Nopupu I	Setelah tinggi tanaman (±20 cm) atau setinggi dibawah lutut orang dewasa	Perawatan	√		Kalau menggunakan pupuk Urea dengan takaran satu sendok teh ditabur di dekat batang jagung dengan jarak sekitar 10 cm
Nolepa	Setelah tanaman umur 4 bulan setelah penanaman	Panen		√	Panen dilakukan oleh laki dan perempuan tapi mayoritas dlakukan oelah perempuan, panen basanya dilakukan mnimal 4 orang dan paling banyak 10 orang, dengan mengupaas kult langsung di batang jagung dengan menggunakan alat

					potosu (alat yang terbuat dari bambu atau kayu yang diruncingkan)
Nolinjo Dale	Dilakukan setelah Nolepa	Panen	√	√	Memasukkan jagung yang sudah di kupas kedalam karung
Nompovai	Dilakukan setelah jagung terkumpul	Panen	✓	√	Jagung yang masih bertongkol, dijemur di bawah terik matahari dengan beralaskan terpal, selama minimal dua hari
Nodros	Dilakukan setelah jagung dijemur	Panen	√		Proses pemisahan biji jagung dengan tongkol jagung dengan menggunakan mesn giling
Nompovai	Dilakukan setelah biji jagung dari tongkol	Panen	√	√	Menjemur biji jagung langsung diatas terik matahari, biasanya proses penjemuran dilakukan hanya sehari
Notimba	Dilakukan setelah biji jagung di jemur	panen	✓		Menimbang berat jagung sebelum di jual

Sumber Wawancara dan Diskusi

Untuk usaha pertanian di desa Kaluku Tinggu, laki – laki mempunyai peran aktif dalam setiap tahapan, sedangkan untuk kaum perempuan khusu pertanian padi sawah mulai terlibat aktif pada saat nonana atau menanam yang ilakukan setelah 25 hari peneyemaian benih, dan pada saat nonana umumnya yang berkeja adalah perempuan, sedangkan untuk usaha tanaman jagung, peran perempuan lebih lebih banyak terlibat dibandingkan dengan usaha pertanin padi, dari proses persiapan lahan dan saat nolepa saat memasuki masa panen, yaitu mengupaas kult langsung di batang jagung dengan menggunakan alat potosu (alat yang terbuat dari bambu atau kayu yang diruncingkan). Sulitnya perawatan serta masalah ketersedian air, kemudian banyak petani padi yang menganti tanaman padinya menjadi tanaman jagung, Selain jagung dan padi, terdapat komoditas tanam s yang diusahakan petani di desa Kaluku tinggu, untuk tanaman jagung stelah tiga kali panen biasaya diganti dengan kacang tanah atau tomat, selain itu terdapat tanaman ketimun yang dalam setegah hektarnya

dapat menghasilkan 12460 biji, yang dipenen selama 30 kali dalam setahun, dengan harga rata - rata Rp 5.000/per 7 biji saat dipasarkan di pasar Inpres yang ada di kota Palu.

Pembiayaan yang dikeluarkan petani dalam proses produksi usaha tani Padi dan jagung dapat dikategorikan dalam dua bentuk pengeluaran, yaitu biaya tetap dan biaya variable. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, yaitu baiaya pajak lahan dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Untuk biaya pajak tergantung dari luas dan kecilnya lahan yang dimiliki. Berikut adalah yang digunakan untuk usaha tani padi dan jagung.

Tabel Alat Produksi Pertanian

		Padi
Arit	sangki	Untuk memotong padi
Papan	dopi	Untuk proses pemsahan pas dari tangkai
Alat semprot	tangki	Untuk menyemprot rumput dan hama
Talang	Baki	Untuk tempat pemisahan pad yang bagus dan tidak
Parang	Taono	Untuk menebas rumput
Sapi	Japi	Sebagai penarik saat membajak
Mata Bajak	Mata bajak	Untuk mengemburkan Tanah
Cangkul	Pemanggi	Untuk menggemburkan tanah dan membuat bedengan
Trakror	Traktor	Milik Desa
	J	agung
Celurit	sarenggo	Memotong rumput
Parang	Taono	Memotong rumput
Pacul	pomanggi	Untuk membuat bedengan
Alat semprot	tangki	Untuk menyemprot rumput
Alat kupas	potosu	Untuk mengupas jagung
Alat tanam	posaku	Untuk membuet lubang tanam

Sumber Wawancara

Rekomendasi Penggunaan pupuk

Berikut adalah rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu pada MK (Musim Kemarau) april hingga September 2019, serta musim hujan (MH) Oktober hingga Maret 2010, untuk penggunaan pupuk tanaman padi dan jagung di lahan sawah irigasi untuk wilayah kecamatan Dolo Barat pada umumnya.

Tabel Rekomendasi Pupuk Padi Sawah Musim Kemarau (April -September 2019)

			Pupuk	: Tung	gal (I	kg/ha)				
Tanpa Ba	han Orgar	nik	Jerami 2 t	ton/ha	3		Pupuk Or	ganik	2 to	n/ha
Urea	SP-36	KCL	Urea SP-3		6	KCL	Urea	SP-36		KCL
250	75	50	230	75		-	225	25		30
	NPK Phoska 15-15-15 (Kg/ha)									
NPK			NPK + Jer	reami	2 tor	n/ha	NPK +	Pupu	ık O	rganik 2
							NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha			
NPK	Ure	a	NPK		Urea		NPK		Urea	
200	200		150		200		100		200	
			NPK Pelai	ngi 20-	-10-20	o (Kg/ha)				
NPK			NPK + Jei	reami	2 tor	ı/ha	NPK +	Pupu	ık O	rganik 2
							ton/ha			
NPK	Ure	а	NPK		Urea	3	NPK		Ure	a
300	125		250		125		200		150	
			NPK Kuja	ang 30	-6-8	(Kg/ha)				

NPK		NPK + Jereami	2 ton/ha	NPK + Pupuk Organik 2			
				ton/ha			
NPK	SP 36	NPK	SP 6	NPK	Urea		
400	-	400	-	250	25		

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Jagung Musim Kemarau (April -September 2019)

	Pupuk Tunggal (kg/ha)										
Tanpa Bahan Organik			Jerami 2 t	2 ton/ha Pupuk Org			ganik	ganik 2 ton/ha			
Urea	SP-3	KCL	Urea	SP-3		KCL	Urea	SP-3		KCL	
350	125	75	330	125		25	325	75		55	
	NPK Phoska 15-15-15 (Kg/ha)										
NPK			NPK + Jer	reami 2	ni 2 ton/ha NPK + Pupuk Organi ton/ha			rganik	2		
NPK	Ure	а	NPK	U	Urea	ì	NPK		Urea		
300	250		300	2	250		225		250		
			NPK Pelai	ngi 20-1	10-1C	(Kg/ha)					
NPK			NPK + Jereami 2 ton/ha			NPK + Pupuk Organik 2 ton/ha			2		
NPK	Ure	а	NPK	Urea		ì	NPK		Urea	3	
450	150		450	1	150		300		200		

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Padi Sawah Musim Hujan (Oktober 2019 - Maret 2020)

	Pupuk Tunggal (kg/ha)													
Tanpa	Tanpa Bahan Organik				Kompos Jerami 2 ton/ha			Pupuk (Orga	Organik 2 ton/ha				
Urea ZA SP-36 KCL			Urea	ZA	1	Sp-36	KCL	Urea	ZA	1	SP-36		KC L	
150	150 100 75		50	130	100	0	75	0	125	100	0	25		30
	NPK 15-15-15 (Kg/ha)													
Tanpa	Tanpa Bahan Organik				Kompos Jereami 2 ton/ha				Pupuk (ıpuk Organik 2 to/ha				
NPK Urea ZA		NPK	NPK Ure		ea	ZA	NPK		Ure	ea	ZA	٨		
200 50		100	175		50		100	125		50		10	0	

Sumber Balitbangtan

Tabel Rekomendasi Pupuk Jagung di Sawah Musim Hujan (Oktober 2019 - Maret 2020)

	Pupuk Tunggal (kg/ha)											
Tanpa Bahan Organik				Kompos Jerami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 ton/ha					
Urea	ZA	SP-36	KCL	Urea	ZA	Sp-	KCL	Urea	ZA	SP-	36	KC
						36						L
300	300 100 125		57	280	100	125	25	275	100	75		55
	NPK 15-15-15 (Kg/ha)											
Tanpa	Tanpa Bahan Organik			Kompos Jereami 2 ton/ha			Pupuk Organik 2 to/ha					
NPK	U	rea	ZA	NPK	Urea		ZA	NPK	Ur	ea	ZA	
300 200 100		275	225		100	200 250)	100			

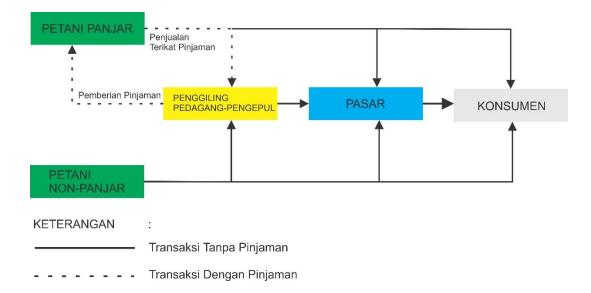
Sumber Balitbangtan

Struktur Pasar Komodiatas Padi Sawah

Dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi (saprodi) atau kebutuhan lainya, di desa Kaluku Tinggu terdapat petani padi sawah yang mengingkatkan diri kepada tengkulak atau pemilik gilingan padi dalam bentuk hutang (saprodi atau uang) yang ada di luar desa, system hutang atau panjar tersebut kemudian ada sebuah perjanjia atau kontak yang tidak tertulis antara pemberi pinjaman dengan petani, system ini lebih dikenal sebagai kelembagaan principal-agen menurut Rowley dan Elgi (1988) dalam Sisfahyuni dkk (2011) bahwa Lembaga Principal-agen ymerupakan suatu hubungan agensi yang didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mengajak orang lain (agen) menyelenggarakan beberapa jasa dengan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Ikatan kontrak tersebut tidak tertulis namun dalam proses pelaksanaanya dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penuturan petani, besar kecilnya hutang yang akan diberikan petani tergantung pada luasan lahan yang digarap, semakin luas lahan yang digarab maka jumlah hutang yang diberikan lebih besar daripda petani yang berlahan sempit, untuk pembayaraan akan dilakukan saat panen, dan ketentun besarnya pembayaran hutang tergantung dari lamnaya pinjaman dengan system potongan, misalkan saat pinjaman dialakukan pada proses awal menanam, dengan harga beras Rp 9000/liter maka harga yang diterima oleh petani Rp 5000/liter dan saat petani meminjam mendekati panen maka harga yang diterima oleh petani antara Rp.7000 – Rp 8.000/liter, potongan tersebut hingga batas besaran hutang, dan untuk sisanya setelah dipotong hutang, kalau ingin dijual ke pemberi hutang harganya berlaku normal Rp. 9000/liter. Dan untuk petani yang tidak terikat dengan kelmbagaan principal agent dapat secara bebas untuk menjual berasnya dengan harga yang normal, berikut adalah bagan komoditas padi di desa Kaluku Tinggu.

Gambar Diagram Pasar Komoditas Padi Sawah



Coklat dan Kelapa

Tanaman coklat dan kelapa merupakan komoditas pertanian yang tidak banyak diusahakan oleh warga desa, dan untuk perawatanya khusunya coklat sangat jarang diberi pupuk untuk peningkatan produktivitasnya, misalkan harus diberi pupuk dilakukan saat setelah panen, untuk pembelian pupuk biasanya diambil setelah uang hasil panen dikurangi untuk pemebliahan pemenuhan kebutuhan sehari – hari, sedangkan tanaman kelapa maupun tanaman coklat pada khusunya dibiarkan tumbuh alamiah dimana untuk perawatanya dialkukan dengan cara membersihkan lahan. Dan untuk varietas coklat yang ditanam di desa selain varietas lokal juga terdapat varietas Hibrida, namun untuk kelapa yang ditanam hanya varietas lokal.

Tabel Varietas Coklat yang Di Tanam di Desa

Uraian	Hibrida	Lokal
Umur	3 tahun, panen 2 minggu skali	3 tahun, panen 2 minggu skali
Masalah	Hama (Pengegerek batang) Pencurian	Hama (Pengegerek batang)

Keunggulan	-	Lebih tahan penyakit
Panen I hejkar	300 kilo (saat manen raya)	300 kilo (saat manen raya)
Harga	25.0000 Biji coklat (kering)	25.0000 Biji coklat (kering)
Warna buah	Merah dan kuning	Merah dan Kuning
Yang di tanam*	2	2
Umur tanaman	25 tahun	25 tahun

^{*}Untuk mengetahui berapa banyak varietas coklat yang ditanam di desa dengan menggunakan system point, antara 1-5 dan 1 paling sedikit

Sumber Diskusi dan Wawancara

Tabel Varietas Tanaman Kelapa Yang Di Tanam Di Desa

Uraian	Lokal						
Umur	7 tahun, berikutnya 3 kali dalam						
	setahun						
Masalah	Penggerek batang dan buah						
PeKeunggulan	Lebih tahan penyakit						
Panen I hejkar	500 kilo Kopra (saat manen						
	raya)						
Harga	1000-2000 biji						
Yang di tanam*	2						
*Untuk mengetahui berapa banyak varietas padi yang ditanam di desa dengan menggunakan system point, antara 1-5 dan 1 paling sedikit							

Sumber diskusi Wawancara

Tanaman coklat dari mulai ditanam dan kemudian panen (awal) saat umur tanaman berumur 3 tahun dan setelah itu 2 minggu seklai dan dalam 4 bulan coklat panen biasanya melimpah (panen raya). Sedangkan untuk tanaman kelapa, panen awal dari saat tanaman berumur 7 tahun dan setelah itu panen dilakukan 3 kali dalam setahun, untuk hasil panen coklat hanya berupa biji coklat kering sedangkan untuk kelapa hanya dijual dalam bentuk biji atau kelapa bulat, sedangkan untuk harga komoditas panen dan coklat di desa sangat fluktuatif, dan untuk penjualan hasil panen, pembeli atau pengepul biasanya datang ke desa dan langsung melakukan transaksi.

Berikut ini adalah pembagian peran antara laki – lakidan perempuan dalam setiap tahapanya (persiapan lahan, tanam, perawatan maupun panen untuk usaha tanam coklat.

Tabel Tahapan dan Pembagian Peran laki – laki dan Perempuan dalam usaha tani tanaman coklat

Uraian	Uraian Pelaksanaan		Pembagian Peran		Keterangan
			L	Р	
Nobibi	Sebelum penanaman	Pembibitan	√	√	Biji kakao di taruh di atas karung kemudian disiram selama 3 hari sampai tumbuh tunas
Mopoker	Sebelum menanam	Penyemaian	√	√	Bibit kakao yang sudah tumbuh tunasnya di pindah satau di tanam ke polibek selama kurang lebih 2 bulan
Notuda	Setelah penyemaian bbit	Penanaman	✓	√	Laki - laki mebuat membuat lubang tanam dengan menggunakan pandoli dan perempuan memasukkan bibit yang telah disemai ke lubang tanam
Novavo	Setelah penanaman	Perawatan	√	√	Memebersihkan lahan dengan cara mencabut rumput
Nosoe	Setelah Penanaman	Perawatan		√	Membersihkan rumput dengan menggunakan sabit atau parang

Nompupuk	Dilakukan pada saat panen	Panen	√	√	Memetik buah coklat dari pohon cokla, panen pertama dilakukan saat tanaman coklat berumur 3 tahun 8 bulan dan panen antara dilakukan selama dua mnggu sekali dan panen raya, dilakukan 3-4 bulan sekali
Notonga sakulati	Setelah di petik	Panen	✓	√	Buah coklat yang sudah dipetik dibelah dengan parang
Nivoval	Setalah biji dipsahkan dari buah	Panen	√	√	Biji coklat dijemur selama satu minggu
Notimba	Setelah coklat kering	Panen	√	√	Biji coklat ditimbang dan pada proses ini biasanya dilakukan saat biji coklat akan dijual

Sumber Diskusi dan Wawancara

Untuk komditas tanam coklat pembagian peran perempuan dan laki – laki dapat dikatakan seimbang jika dibandingkan dengan komoditas usaha pertanian lainya yang ada di desa Kaluku Tinggu, dari tahab penyemaian, perawatan hingga panen, khusus untuk perawatan seperti membersihkan rumput disekitaran area tanaman

Pendekatan Sustainable livelihood

Penghidupan (livelihood) terdiri dari kemampuan, asset dan kegiatan-ke giatan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) akan berlangsung ketika penghidupan tersebut mampu mengatasi dan memulihkan diri dari tekanan maupun goncangan, serta menjaga kemampuan dan asetaset tersebut pada masa kini dan masa depan (Chambers and Conway (1992) yang diadopsi oleh Department for International Development (DFID), dan tentang aset penghidupan, para ahli seperti Chambers and Conway (1992), Blaikie (1994) dan De Haan (2000) meyakini bahwa seseorang dalam melangsungkan kehidupannya membutuhkan setidaknya lima aset penting guna melangsungkan penghidupan yang berkelanjutan, yaitu; asset alam (natural capital), aset manusia (human capital), aset fisik (physical capital), aset sosial (social capital), dan aset keuangan (financial capital). Kelima aset inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan

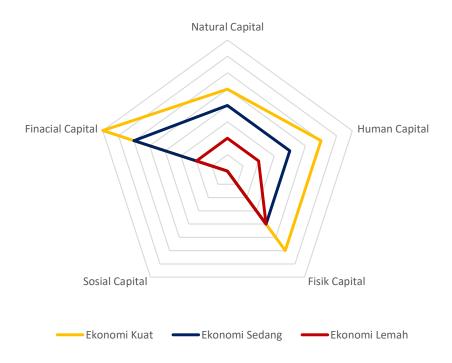
pentagon assets (Sunarji dkk, 2011) , Berikut adalah analisis asset Rumah Tangga di Desa Kaluku Tinggu

Tabel Asset dan Aksesnya Untuk Setiap Golongan Ekonomi

Asset	Ekonomi Kuat	skor	Ekonomi Sedang	Skor	Ekonomi Lemah	Skor				
Natural Capital	Kurang dari 1,5 Ha	3	Dibawah 0,5 Ha	1	Tidak punya	1				
					tanah					
	Punya tanaman	2	Punya tanaman	1	Tidak punya	1				
	coklat kurang		coklat kurang		tanaman coklat					
	lebih 400 pohon		lebih 100							
			pohon							
Human Capital	Dalam satu	3	Dalam satu	2	Dalam satu	1				
	keluarga terdapat		keluarga		keluarga					
	anggota keluarga		terdapat		terdapat					
	yang		anggota		anggota					
	pendidikanya s1		keluarga yang		keluarga yang					
			pendidikanya		pendidikanya sD					
			SMA							
Infrastruktur	Rumah sudah	3	Rumah sudah	2	Rumah semi	2				
Capital	permanen		permanen		permanen lantai					
	berlantai keramik		berlantai		semen					
			semen							
Finanisal	Penghasilan	4	Penghasilan	3	Kurang lebih	1				
Capital	kurang lebih 4		kurang lebih 2,5		penghasilan 500					
	juta sebulan		juta		ribu					
Social	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0				
	perbedaan		perbedaan		perbedaan					
Untuk skor asset	Untuk skor asset menggunakan system point 1 sampai dan 5, dan 1 paling rendah									

Sumber Diskusi dan Wawancara

Gambar Pentagon Asset Desa Kaluku Tinggu



Aset penghidupan rumah tangga ekonomi lemah di sector finansial, human capital maupun natural nilai-nya rendah, artinya adanya keretanan atas akses tehadap asset tersebut dalam upaya untuk untuk menunjang pemenuhan kebubutuhan hidup. Sedangkan untuk sector sosial seperti partisapasi dalam organisasi kelembagaan di mayarakat, gotong royong, hubungan kekerabatan serta jaringan sosial di desa Kaluku Tinngu untuk semua golongan ekonomi kuat, sedang maupun lemah dapat dikatakan tidak ada perbedaan atau posisinya sama. Pada sector atau asset yang berkaiatan denagan modal fisik seperti sarana dan prasarana, peralatan kerja/produksi dan aksebilitas untuk keluarag golongan ekonomi lemah dan sedang nilainya sama atau tidak ada perbedaan akses. Sedangkan untuk ekonomi kuat selain pada asset sosial di ke-empat asset tersebut memiliki nilai tinggi artinya tidak ditemukan kerentanan.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan, menurut Scones (dalam Rathna Wijayanti dkk, 2016) terdapat 3 (tiga) bentuk strategi penghidupam yang dilalakukan umumnya di pedesaan. Pertama Intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu tetap bertahan pada mata pencaharian semula.

Namun demikian, intensifikasi memberikan penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi per satuan luas melalui penanaman modal atau peningkatan input tenaga kerja, sedangkan ekstensifikasi mengupayakan lebih banyak tanah untuk ditanami. Kedua, Diversifikasi, yaitu mencari alternatif lain dari kegiatan off-farm atau non-farm sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ketika mata pencaharian lama dirasa tidak memungkinkan ketiga Migrasi, yaitu mencari penghidupan di tempat lain baik sementara atau permanen serta berganti pekerjaan.

Ketiga strategi penghidupan tersebut dapat ditemukan di Kaluku Tinggu, pertama strategi intensifikasi maupun eksentifikasi pada lahan pertanian dilakukan oleh semua gololangan ekonomi dengan perbedaan kuantitas, Golongan ekonomi kuat dengan luas lahan yang dimiliki dapat memungkinkan meningkatkan hasil produksi, sehingga intensifikasi atas pembrian imput saprodi juga cukup besar, sedangkan untuk ekonomi sedang dan ekonomi lemah yang lahannya sempit dibawah setengah hektar dalam menunjang produktifitas hasil pertanian terkadang harus mengikatkan diri dengan cara berhutang pada penggiling atau pengepul pedagang untuk pemberian imput saprodi, selain itu untuk menunjang kebutuhan sebelum panen berprofesi sebagai buruh tani. Sedangkan untuk menujang pendapat selain hasil dari padi, semua golongan ekonomi juga mengupayakan jenis tanaman lain seperti jagung, ketimun, kacanag tanah dan cabe.

Pekerjaan di sector pertanian masih menjadi pekerjaan utama warga desa Kaluku Tinggu, namun untuk peningkatan hasil pendapatan semua golongan ekonomi juga melakukan pekerjaan lain selain bercocok tanah atau disertifikasi petanian , namun sebgain modal yang digunakan untuk usaha berasal dari sector pertanian. Strategi disertifiaksi untuk setiap golongan ekonomi anatara satu dengan yang lainya berbeda, misal untuk golongan ekonomi lemah ataupun sedang dengan cara menjual kebutuhan sehari – hari dengan membuat kios kecil atau menjaual makan jadi, dan usaha ini biasanya dilakukan tidak jauh dari rumahnya dan umumnya oleh kaum perempuan, sedangkan untuk golongan ekonomi kuat membuka usaha dengan modal yang lebih besar dan terkadang hingga memperkejakan seseorang untuk menjadi buruh.

Strategi migrasi atau memilih bekerja di luar desa untuk dapat meningkatkan pendapatan atau sebagai sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari - hari sebelum panen, strategi ini dilakukan juga oleh semua golongan lapisan ekonomi, untuk golongan ekonomi lemah dan sedang, umumnya bekerja di sector informal sebagai buruh harian lepas dengan menjadi kuli bangunan., selain itu dalam pemenuhan kebutuhan konsusmsi masyarakat di desa Kaluku Tinggu dalam dilihat dari table dibawah ini

Tabel Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Warga Desa

NO	Uraian	Nama Lokal	Keterangan		
	Tanaman Padi – padian				
	Beras	Ose	00		
	Jagung	Dale	00		
	Tepung terigu	Gando	0		
	Ubi Jalar	Tomoloku	00		
	Cabe	Marisa	00		
	Tomat	Parancina	00		
	Kelor	kelo	00		
	Sawi	Sawi	0		
	Bayam	Bayam	000		
	Labu Siam	Labu sia	00		
	Kentang	Kanta	0		
	Bawang Merah	Pia lei	0		
	Bawang Putih	Pia puti	0		

Daun sup	0
Camangi	0
Poi	00
Tumbavani	00
Kuni	00
Balintua	00
Samangka	0
Antimu	00
Ganaga	00
Taipa	00
Tanggo	000
Tava pia	0
lauro	0
Sapiri	0
Tumba avo	000
Rica jawa	0
Dale	00
Alpokat	0
Lonja	00
Durian	0
Корі	0
	Camangi Poi Tumbavani Kuni Balintua Samangka Antimu Ganaga Taipa Tanggo Tava pia lauro Sapiri Tumba avo Rica jawa Dale Alpokat Lonja Durian

Loka pagata	00
Lobe	00
Tanggidi	000
Pae pulu	00
Kaluku	00
Paku	000
Ntolu	0
Bau gara	0
Rono	0
Duo	0
Bau bele	0
Dagi japi	0
Dagi manu	00
Bau ntasi	0
Dagi tovau	0
Bau mujair	0
Paku	000
Dale pulu	00
Sese gampaya	000
Tava kasubi	00
Gampaya	00
	Lobe Tanggidi Pae pulu Kaluku Paku Ntolu Bau gara Rono Duo Bau bele Dagi japi Dagi manu Bau ntasi Dagi tovau Bau mujair Paku Dale pulu Sese gampaya Tava kasubi

Lemo ganda	0
Tara	00
Palola	00
Buku dale	0
Tumba avo	000
Loka ambon	0
Rumbi	0
Rombo	000
Toboyo	00
Lolo ntoboyo	0
Cangkore	00
Tahu	0
Tempe	0
Kaledo	0
Lunu	00
Bau uru	0
Lindu	000
Bau lele	0
Kalumbe	0
Kulu	00
Lika raja	00
	Tara Palola Buku dale Tumba avo Loka ambon Rumbi Rombo Toboyo Lolo ntoboyo Cangkore Tahu Tempe Kaledo Lunu Bau uru Lindu Bau lele Kalumbe Kulu

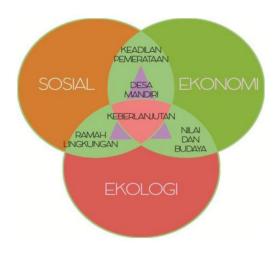
	Pare	paria	00
	Sagu	Tabaro	0
	Jatung pisang	Pusu	00
	Kacang hijau	Kacang ijo	0
Keterangan o = membeli, oo= budidaya ooo = liar			

Sumber Diskusi

Indek Desa Membangun Desa Kaluku Tinggu

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan Desa (IKL), IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Sedangkan tujuan penyusunan IDM, adalah (a). menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan (b) . menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. IDM disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Permendesa o2/2016).

Gambar Keterhubungan Tiga Dimensi Indek Desa Membangun



Sumber Buku SOP IDM

IDM kemudian, menetapkan status desa menjadi lima yaitu:

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907
2	Tertinggal	kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
3	Maju	kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989
4	Berkembang	kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
5	Mandiri	lebih besar (>) dari 0,8155.

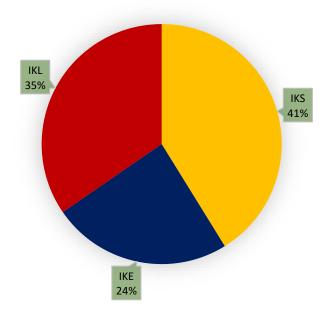
Sumber Permendes 02/2016

Rumusan Formulasi dalam menentukan status Desa dalam IDM¹⁰ sebagai berikut

$$IDM = \frac{1}{3} \quad (IKL + IKE + IKS)$$

Pada tahun 2019, IDM desa Kaluku Tinggu o.6426¹¹ dengan masiang – masing nilai indek IKL = 0,667, IKE = 0.467, dan IKS = 0.794¹² sehingga dapat dikategorikan sebagai desa berkembang atau desa yang disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Berikut adalah nilai setiap indek:





¹⁰ Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variable diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

¹¹http://idm.kemendesa.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112002&tah_un=2019 (Diakses Pada 28 oktober 2019)

¹² Data IDM Desa Kaluku Tinggu 2019

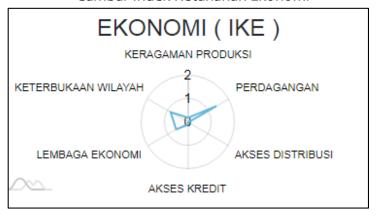
Nilai Indeks Ketahanan terendah di Kaluku Tinggu berdasarkan data IDM yang dikeluarkan oleh Kememterian Desa, ada pada Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) yang nilainya hanya 24 persen, rendahnya nilai indek ketahanan ekonomi dikaibatkan oleh pertama pada dimensi akses ditribusi, tidak adanya akses disribusi logistic misalkan dalam bentuk ketersedian jasa logistic, sehingga hal ini kemudian berpengaruh pada keluar masuknya komoditas maupun barang di desa, Kedua pada dimensi produksi khususnya dalam bentuk keragaman produksi yang ditandai dengan minimnya jenis kegiatan ekonomi penduduk, dimana jumlah industri mikro yang ada desa jika dibandingkan dengan jumlah KK nilainya sangat rendah. dan ketiga minimnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pengkreditan juga menyumbang kerentanan atas ketahanan ekonomi di desa. Namun disisi lain tersedaianya ekonomi rakyat dalam bentuk BUMDES, akses penduduk ke pusat perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen), tersedianya jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih serta kualitas jalan desa baik, merupakan potensi yang meningkatkan nilai ketahanan ekonomi.

Berikutnya untuk nilai indek ketahanan Lingkungan (IKL), kerentanan IKL di Kaluku Tinngu diakibatkan oleh ketiadaan upaya tanggab bencana di desa seperti tidak adanya system peringatam dini, perlengkapan keselamatan saat menghadapi bencana serta fasilitas mitigasi lainnya, namun tingkat resiko bencana di desa sangat tinggi. Sedangkan untuk nilai kwalitas lingkungan sangat baik yang ditandai dengan tidak adanaya pencemaran terhadap air, tanah, maupun udara di desa.

Terakhir, Indek Ketahanan Sosial, merupakan Indek dengan nilai terbesar, tinnginya nilai IKS diakibatkan tingginya nilai pada dimensi Solidaritas sosial dalam bentuk gotong royong, dimensi keberdayaan masyarakat untuk kesehatan yang ditandai dengan akses masyarakat ke polides mauapun posyandu serta tingkat aktivitas masyarakat dalam mengikuti program kesehatan di posyandu, dimensi Akses Pendidikan dasar menengah, yang dihitung dari jarak tempuh menuju fasiltas Pendidikan setingkat sekolah dasar dan menengah, dan di dimensi pemukiman dalam bentuk Akses Air Bersih dan Layak Minum, Akses ke Fasilitas Sanitasi, Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi, namun di IKS, keretantan terjadi di dimensi

kesehatan terkait dengan jaminan kesehatan yang ditandai dengan rendahnya kepersetaan BPJS di desa, berikut adalah gambaran detail setiap indek

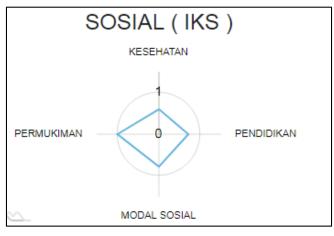
Gambar Indek Ketahanan Ekonomi



Gambar Indek Ketahanan Lingkungan



Gambar Indeks Ketahanan Sosial



Bab III

Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Desa

Undang Undang No 24/2007 tentang Penanggulakan mendefinisikan Bencana sebagai "peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis" (Pasal 1 ayat 1), dan berdasar klasifikasinya di bagi menjadi 3 (tiga), pertama, Bencana Alam atau bencana yang diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.kedua Bencana nonalam, Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan terakhir ke-tiga, Bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror (Pasal 1 ayat 2,3 dan 4).

Berdasar atas ketetapan yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dengan skor 28 ¹³, desa Kaluku Tinngu dapat dikategorikan sebagai Desa Tangguh Bencana Pratama, dalam Perka tersebut, tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan: (a) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) di tingkat desa atau kelurahan (b). Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen

¹³ Pengisian kuisioner dilakukan melalui wawancara langsung dengan perangkat desa, dalam lampiran Perka BNPB 1/2012 disebutkan bahwa penilaian tingkat ketangguhan melalui kuesioner merupakan penilaian yang sifatnya sederhana dan sedikit subjektif, Kuesioner tersebut terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Pertanyaan disusun dengan jawaban 'Ya' atau 'Tidak' dan setiap jawaban 'Ya' akan diberi skor 1, sementara jawaban 'Tidak' akan diberi skor 0. Berdasarkan penilaian ini desa atau kelurahan dapat dikelompokkan menjadi:

⁻ Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)

⁻ Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)

⁻ Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

perencanaan PB (c). Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat (d). Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/Kelurahan (e). Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan (f). Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana (Perka BNPB 1/2012)

Dalam Perka BNPB Nomor 1/2012, Desa Tangguh Bencana secara garis besar diharapakan dapat memiliki beberapa komponen sebagai berikut, (1). Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa (2). Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan), (3). Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana (4). Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan), (5). Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatankegiatan pengurangan risiko bencana (6). Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tangggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Sejarah Bencana

Gempa yang terjadi pada Jumat, 28 Spetember 2018 pukul 18:02:44 WITA (Waktu Indonesia Tengah) yang berkekuatan 7,4 magnitudo dengan kedalaman 11Km, yang memiliki episenter yang terletak pada koordinat 0,18°LS dan 119,85°BT, tepatnya di darat pada jarak 26 Km dari Donggala, dan hasil analisis terhadap semua aktivitas gempa, baik gempa pembuka (Foresshock), gempa utama (mainshock) dan gempa susulan (oftershock) menunjukkan adanya kaitan yang erat dengan aktivitas Sesar Palu - Koro

Tingginya tingkat aktivitas kegempaan di daerah sulawesi tengah dan sekitarnya tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif (Daryono,2011) dan Kompleksitas Tektonik di Sulawesi yang dikenal sangat rumit tampak dari zona subduksi dan banyaknya sebaran sesar aktif di Sulawesi, termaksud adalah sesar Palu -Koro, yang merupakan struktur struktur geologi dengan mekanisme pergerakan mendatar mengiri (sinistal strike-slip), sesar palu -Koro membelah pulau Sulawesi dari teluk palu hingga Teluk Bone menjadi dua bagian yaitu blok barat dan blok timur (Daryono, 2018). Selain gempa dan tsunami pada 28 oktober 2018, catatan gempa yang terjadi akibat aktivitas Sesar Palu Koro yang paling tua terjadi pada tahun 1900-an awal

Tabel Sejarah Gempa dan Tsunami Di Sulawesi Tengah

Tahun	Kejadian dan Dampak
1909	Gempa mngguncang teluk Palu dengan kekuatan yang diperkirakan diatas 7,0 magnitudo, gempa ini merusak rumah di Zona Graben Palu, diceritakan kekuatan gempa dapat menjatuhkan orang yang sedang bendiri, serta menjatuhkan daun dan buah dari pohon kelapa muda
1 Desember 1927	terjadi gempa dan tsunami yang bersumber di teluk Palu yang mengakibatkan kerusakan parah di kota Palu, Binomoru dan

Sulawesi yang jaraknya sekitar 230 Km, dan Gempa Bumi tersebut memicu terjadinya Tsunami di Teluk Palu dengan tinggi gelombng 15 Meter, akibat Tsunami banyak rumah disekitaran pantai yang mengalami rusak parah, akibat gempa dan tsunami terdapat 14 orang meninggal dan 50 orang menagalami luka - luka, selain itu Tsunami juga menimbulkan kerusakan dipelabuhan, tangga dermaga di pelabuhan Talise hanyut, dan berdasarkan laporan, terjadi penurunan permukaan dasar laut setempat sedalam 12 Meter. Bencana gempa bumi tersebut dikenang oleh masyarakat sebagai peristiwa "air berdiri di Teluk Palu"

20 Mei 1938

Gempabumi dan Tsunami Parigi yang dirasakan hampir diseluruh bagian Pulau Sulawesi dan Bagian timur pulau Kalimatan. Daerah yang menderita kerusakan paling parah adalah kawasan Teluk Parigi di tempat ini dilaporkan 942 unit rumah roboh dengan kerusakan yang ditimbulkan meliputi lebih dari 50 % rumah yang ada wilayah tersebut, sedangkan 184 rumah lainnya rusak ringan. Sedangkan untuk korban jiwa di Teluk Parigi dilaporkan 16 orang tewas tenggelam, dan di Ampibabo satu orang tewas tersapu gelombang tsunami. Selain itu gempa dan tsunami berdampak pada hanyutnya dermaga Pelabuhan Parigi dan menara suar penjaga pantai mengalami rusak berat. Binatang ternak dan pohon kelapa juga banyak yang hanyut tersapu gelombang tsunami. Beberapa ruas jalan di daerah Marantale mengalami retak-retak dengan lebar 50 cm disertai keluar lumpur, bahkan sebuah rumah bergeser hingga 25 meter, namun daerah Palu mengalami kerusakan ringan. Di daerah Poso dan Tinombo dirasakan getaran sangat kuat, tetapi tidak menimbulkan kerusakan.

	14 Agustus 1968	Gempabumi dan Tsunami Tambu merupakan gempa bumi kuat
		yang bersumber di lepas pantai barat laut Sulawesi. Akibat
		gempabumi tersebut, di Teluk Tambu, antara Tambu dan
		Sabang, terjadi fenomena air surut hingga kira-kira 3 meter dan
		selanjutnya terjadi hempasan gelombang tsunami.Pada
		beberapa tebing terjadi longsoran dan terjadi retakan tanah
		yang disertai munculnya pancaran air panas.
		Di Daerah Sabang dilaporkan bahwa tsunami datnng dengan
		suara gemuruh. Tsunami tersebut juga menyerang di sepanjang
		pantai Palu. Menurut laporan, ketinggian gelombang tsunami
		mencapai 10 meter dan limpasan tsunami ke daratan mencapai
		500 meter dari garis pantai. Daerah yang mengalami kerusakan
		paling parah adalah kawasan Mapaga. Ditempat ini
		ditemukan160 orang meninggal dan 40 orang dinyatakan
		hilang, serta 58 orang luka parah.
_	1996	Gempa bumi dan Tsunami Toli-Toli dan Palu dengan kekuatan
	.,,,,,	6.3 magnitudo, menyebabkan 9 orang tewas, serta kerusakan
		parah di Desa Bangkir, Toli-Toli, Tonggolobibi, dan Palu.
		Gempabumi ini juga memicu tsunami dengan ketinggian 2
		meter dengan limpasan air laut ke daratan sejauh 400 meter
		(Suparto et al. 2006)
		(Supurto et di. 2000)
	24 Januari 2005	24 Januari 2005, Sulawesi Tengah diguncang gempa 6,2
		magnitudo. Pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu. Akibat
		gempa ini 100 rumah rusak, satu orang meninggal dan empat
		orang luka-luka.
	7 November 2008	gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo berpusat di Laut
		Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
		Akibatnya empat orang meninggal
	18 Agustus 2012	Gempa Bumi dengan kekuatan 6,2 magnitudo episenter

	diperkirakan terletak dia atara Kulawi dan Danau Lindu, Gempa
	Bumi ini menyebabkan 5 korban meninggal dan 694 meninggal

Sumber

- -Tataan Tektonik Dan Sejarah Kegempaan Palu, Sulawesi Tengah Oleh Daryono, S.S.i.,M.Si. (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)) 2011
- -Sejarah Kegempaan Di Sesar Palukoro Oleh Daryono, S.S.i., M.Si. (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)) 2018
- -https://www.jawapos.com/nasional/29/09/2018/ini-sejarah-bencana-gempa-dan-tsunami-di-sulawesi-tengah/

Terdapat 3 dampak yang dihasilkan oleh gempa pada 28 spetember 2018, pertama bahaya dari deformasi permukaan akibat pergeseran sesar, kedua bahaya goncangan gempa dan ketiga bahaya susulan meliputi tsunami, likufaksi dan gerakan tanah (Pusat Studi Gempa Nasional, 2018), dan terkait jumlah korban dapat dilihat pada tabel dibawah in

Tabel Korban Jiwa

No	Korban Jiwa	Jumlah (jiwa)
1	Meninggal	2.096
2	Hilang	1.373
3	Luka Berat/Rawat Inap	4.438
4	Luka Ringan/Rawat Jalan	83.122
5	Pengungsi	173.552

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Tabel Kerusakan Infrastruktur dan Bangunan akibat Bencana¹⁴

No	Bangunan	dan	Jumlah	

¹⁴ https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah (diakses pada 25 oktober 2018)

	Infrastruktur	
1	Rumah	68.451 unit
2	Rumah Ibadah	327 unit
3	Sekolah	265 unit
4	Perkantoran	78 unit
5	Toko	362 unit
6	Jalan	168 titi retak
7	Jembatan	7 unit

Sumber: BNPB

Tabel Kerusakan Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah (unit)
1	Rumah Sakit	1
2	Puskemas	50
3	Pustu	18
4	Poskesdes	5

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Dampak sosial lainya yang timbul antara lain, per 29 oktobe 2018,dinas kesehatan mencatat terdapat 2.194 kasus penyakit ISPA dan 1.300 Kasus diare akut di Kota Palu, sedangkan untuk kabupaten Donggala, 2.110 kasus mayoritas penyakit ISPA dan diare akut sebanyak 1.463 kasus, untuk Kabupaten Sigi mayoritas penyakit ISPA sebanyak 1.665 Kasus serta hipertensi 793 kasus. (kementerian kesehatan, 2018)

Sementara terkait kerugian material yang diakibatkan oleh kerusakan akibat Bencana diperkirakan mencapai 13,82 triliyun rupiah, yang meliputi 5 sektor pembangunan, di sektor permukiman mencapai Rp 7,95 trilyun, sektor infrastruktur Rp 701,8 milyar, sektor ekonomi produktif Rp 1,66 trilyun, sektor sosial

Rp 3,13 tilyun, dan lintas sektor mencapai Rp 378 milyar. Dan jika dilihat berdasarkan sebaran wilayahnya, maka kerugian dan kerusakan di Kota Palu mencapai Rp 7,63 trilyun, Kabupaten Sigi Rp 4,29 trilyun, Donggala Rp 1,61 trilyun dan Parigi Moutong mencapai Rp 393 milyar.¹⁵

Sejarah dan Dampak Bencana Di Desa Kaluku Tinggu

Bencana Alam

Wilayah desa Kaluku Tinggu secara keseluruhan ditetapkan sebagai kawasasan Zona Rawan Bencana (ZRB)¹⁶, dengan kategori ZRB 2 (Zona Bersyarat) dengan kriteria 2G atau Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah dan ZRB 3 (Zona Terbatas) dengan kriteria 3G atau Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi. Gerakan Tanah adalah pegerakan massa bebatuan , puing -puing atau tanah menuruni lereng (Cruden, 1991 dalm Djoko Santoso)¹⁷

Selain itu di sebelah timur pemukiman tepatnya di areal perkebunan warga yang berbatasan dengan Kawasan hutan dilintasi oleh patahan sesar aktif Palu Koro. Patahan aktif sesar Palu-Koro membentang dari batas selatan desa Kaluku Tinggu dengan Balampewa hingga batas desa sebelah utara yang berbatasan dengan Balaroa Pewunu yang berdekatan dengan Tabalola.

Jika dilihat berdasarkan tata guna lahan yang ada di desa Kaluku Tinggu, Wilayah yang masuk dalam Kawasan ZRB 2 G dan ZRB 3 G dapat dilihat dari table dibawah ini (Lihat Juga Peta Tata Guna Lahan):

¹⁷ Djoko Santoso Abi Suroso, Ph D, Modul 4: Manajemen Bencana- Bahaya Gerakan Tanah

¹⁵ Data per 20/10/2018, perhitungan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum dilakukan perhitungan. Sumber https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah

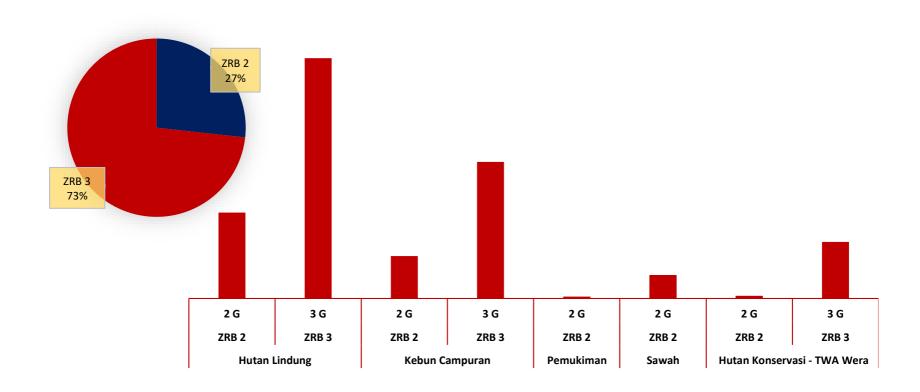
¹⁶ Berdasarkan Peta Zona Rawan Bencana Palu dan Sekitarnya (Alternative I)

Tabel Kawasan ZRB Berdasakan Tata Guna Lahan Desa

No	Tataguna Lahan	Zona Rawan		Luas
	Desa	Bencana	Keterangan	(Ha)
1	Hutan Lindung	ZRB 2G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	196,50
	Trucari Lindung	ZRB 3G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	551,09
2	Kebun Campuran	ZRB 2G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	97,07
	Rebuit Campuran	ZRB 3G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	312,88
3	Pemukiman	ZRB 2G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	4,22
4	Sawah	ZRB 2G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	53,70
5	Hutan	ZRB 2G	Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah	5,82
	Konservasi - TWA			
	Wera	ZRB 3G	Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi	129,24
			Luas Total	1.350,53

Sumber Data Spasial

Gambar Grafik Kawasan ZRB Berdasarkan Tata Guna Lahan



Berdasarkan table diatas wilayah desa yang masuk dalam ZRB 2G luasannya 361,05 atau 27 persen sedangkan yang berada di ZRB 3 G mencapai 989,69 atau 73 persen dari luas total desa. Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah merupakan daerah yang punya potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika cuarah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing, jaLan atau jika lereng mengalami gangguan sedangkan Zona Gerakan Tanah Tinggi Merupakan daerah yang punya tingkat keretanan tinggi untuk terkena Gerakan tanah, pada zona ini sering terjadi Gerakan tanah, sedangakan Gerakan tanah lama dan Gerakan tanah baru masih aktif beregrak , akibat curah hujan yang tinggi dan cuarah hujan yang kuat (ESDM,2009)¹⁸.

Wilayah desa yang berada pada ZRB 2G selain meliputi secara keseluruhan wilayah pemukiman desa di dusun 1 dan dusun 2 yang terdapat rumah penduduk, fasilitas sosial serta fasilitas umum desa, mata air, dan juga areal persawahan dan sebagian kecil kebun masyarakat dan Kawasan hutan yang didalamnya seperti di kawasan Rampangale dan Fayolipe. Sedangkan wilayah desa yang berada di Kawasan ZRB tiga jika dilihat dari penggunaan lahanya, 40,79 persen terdapat di Kawasan hutan dan 32,46 persen berada di kebun campuran milik warga. Dan untuk lebih detail dapat dilihat pada peta dibawah.

Wilayah desa yang berada dalam ZRB 2 (Zona Bersyarat) arahan spasial pasca bencana atau ketentuan pemanfaatan ruangnya, ditekankan oleh Pemeritah sebagai berikut, pertama, pembangunan baru harus mengikuti standart yang berlaku (SNI 1726)¹⁹. Kaidah bangunan tahan gempa (lutfi,2017) saat gempa kecil tidak boleh ada yang rusak, berikutnya ketika gempa menengah komponen struktur tidak boleh rusak, no-struktur rusak dan terakhir pada gempa tinggi, komponen struktur boleh rusak, bangunan tidak boleh roboh tetapi keselamatan penghuni bangunan baik selama evakuasi atau diluar tetap terjamin. Kedua, pada zona rawan Tsunami dan rawan banjir bangunan hunian disesuaikan dengan

-

¹⁸ ESDM: Peta Zona Gerakan Tanah Propinsi Sulawesi Tengah.

¹⁹ Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung

tingkat kerawanan bencananya, ketiga Intensitas pemanfaatan ruang rendah, sedangkan untuk wilayah desa yang terdapat dalam ZRB 3 (Zona Terbatas), pertama dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting beresiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, Gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomikasi), kedua Pembangunan kembali hunian perkuat sesuai standart yang berlaku (SNI 1762) dan ketiga pada Kawasan yang belum terbangun dan berada pada zona rawan likuifaksi sangat tinggi dan rawan Gerakan tanah tinggi diprioritaskan untuk fungsi Kawasan lindung atau nonbudidaya, non-terbangun (pertanian, perkebunan dan kehutanan)²⁰.

Berdasar hasil diskusi serta wawancara, terdapat 2 jenis bencana alam yang pernah terjadi di desa Kaluku Tinggu yaitu Bencana Alam meliputi bencana Gempa Bumi dan Bencana Longsor .

Tabel Sejarah Bencana Desa

Waktu Kejadian	Uraian
	Gempa Bumi
24 Januari 2005	Terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 Magnitudo dengan pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu. Kejadian gempa tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berarti , tidak ada rumah masyarakat yang mengalami kerusakan serta tidak juga terdapat masayrakat yang menderita luka (ringan, sedang maupun berat), pada saat gempa masyarakat mengevakuasi diri di depan rumah, namunj tidak sampai harus mengungsi, dan pasca gempa masyarakat masih menjalalankan aktivitas seperti biasa
28 oktober 2018	Saat terjadi gempa bumi dengan kekeuatan7,4 magnitudo, pukul 18:02:44 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan kedalaman 11 Km, yang memiliki episenter yang terletak pada koordinat 0,18°LS dan 119,85°BT, tepatnya di darat pada jarak 26 Km dari Donggala.
	Kejadian gempa mengakibatkan beberapa warga desa mengalami luka ringan ataupun sedang karena terkena runtuhan rumah, gempa juga mengakibatkan ada sekitar 8 rumah warga yang mengalami rusak berat dan kurang lebih 60 unit rumah yang mengalami rusak ringan dan berat, selain itu gempa juga merusak saluran irigasi masyarakat
	Untuk menghindari adanya gempa susulan ada warga yang

²⁰ Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan sekitarnya Alternative 1, 2019

mengungsikan diri depan rumah secara mandiri dan ada juga yang mengungsi secara berkelompok selama kurang lebih 4 bulan, untuk pemenuhan kebutuhan selama mengungsi dalam satu minggu sebelum datangnya bantuan masyaraat memanfaatkan hasil kebun seperti pisang, ubi maupun jagung, dan Pasca Gempa selama berada di pengungsian warga tidak melakukan aktivitas berkebun selama satu bulan, begitupun juga warga yang berprofesi sebgai buruh harian lepas (BHL) sebagai buruh bangunan juga tidak dapat bekerja. Sehingga masyarakat mengantungkan pemenuhan kebutuhan dari bantuan yang datang.

Untuk dampak ekonomi, selain adanya komoditas yang mengalami gagal panen karena gempa, disisi lain rusaknya jaringan irigasi di dusun 2 berdampak pada air tidak dapat mengalir ke sawah kemudian ada beberpa masyarakat yang mengubah tanaman padi sawah menjadi tanaman jagung dan hortikultura yang dianggab tidak membutuhkan air.

Longsor

Kejadian longsor diperkirakan terjadi dalam setiap tahunya, longsor terjadi di wilayah dusun II yang ditetapkan sebgai Kawasan hutan (lereng gunung), walau tidak mengakibatkan rusaknya rumah warga dan tidak adanay korban jiwa ataupun yang mengharuskan warga mungungsi, dikarenakan posisi longsor jauh dari pemukiman, namun akibat longsor mengangu lairan air dari gunung ke lahan sawah milik warga.

Sumber Wawancara dan Diskusi

Kajian Resiko Bencana Desa Kaluku Tinggu

Resiko bencana Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Lampiran Perka BNPB 02/2012)²¹. Berdasar Hyogo Frame Work for action²² bahwa resiko bencana muncul ketika bahaya berinteraksi dengan kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan (HFA, 2005 hal 1).

_

²¹ Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana

 $^{^{22}}$ Hyogo Frame Work For Action atau Kerangka aksi Hyogo dihasilkan setelah pertemuan 2^{nd} World Conferce on Disaster Reduction tanggal 18-22 januari 2005 di Kobe, Hyogo Jepang, aksi - aksi kerangka tersebut telah diadopsi oleh 168 Negaradalam upaya pengurangan resiko bencana.

Tabel Pemeringkatan Ancaman

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman	Perkiraan Dampak		Kemungkina terjadi	n	Total Nilai	
		kondisi	Nilai	Keterangan	Keterangan	Nilai	
Geologi	Gempa Bumi	Berat	3	Rumah rusak, luka ringan dan sedang, gagal panen, irigasi rusak	Pasti Terjadi	3	6
Gerakan Tanah	Longsor	Sedang	2	Irigasi rusak, tebing menjadi curam	Sangat Mungkin	2	4

Untuk Nilai menggunakan system point (Ringan = 1, Sedang = 2 dan Berat = 3) (Kemungkinan kecil terjadi = 1, Sangat Mungkin = 2 dan Pasti terjadi = 3) sedangkan untuk nilai total (1-2 = ringan, 3-4= Ringan, 5-6= Tinggi)

Sumber Diskusi

Karakter Bencana: Gempa Bumi

KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	Pergerakan sesar Palu Koro
Faktor Perusak	Rumah roboh, tanah bergelombang, tanah keluar lumpur
Tanda Peringatan	Terdapat gempa – gempa kecil
Sela Waktu	Dari jam 3
Periode	32 Tahun
Frekuensi	3 kali
Durasi	2-10 detik
Intensitas	7,4 magnitudo
Posisi	Lewat diatas Palu Koro

Sumber Diskusi

Rencana Penanggulangan Bencana

Dalam Perka BNPB 01/2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana disebutkan bahwa Desa tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. penanggulangan bencana

Jenis Ancaman	Lokasi	Bentuk Resiko	Kerentanan yang di miliki	Kapasitas Yang dimilikii	Rencana Aksi Penangangan Bencana		ncana
					Pencegahan dan mitigasi (structural dan non structural)	Kesiapsiagaan	Peningkatan Kapasitas
Gempa Bumi	Dusun I dan II	Fisik Terdapat 8 unit rumah warga yang mengalami rusak berat dan kurang lebih 60 unit warga yang mengalami rusak ringan dan sedang Rusaknya jaringar irigasi di dusun II Rabat beton jalan ke taman wisata rusak Taman Wisata rusak Sosial Terdapat warga yang mengalami luka ringan dan sedang		Budaya gotong royong masih kuat Kebanyakan warga masih punya ikatan keluarga antara satu dengan yang lain Adanya stock makanan lokal Adanya bantuan dari pemerintah, pihak swasta, NGO dan lain - lain	Pencegahan dan Mitigasi Non Struktural Perencanaan tata guna lahan yang memperhitungkan resiko bencana Pembuatan Produk Hukum di tingkat desa terkait Penanggulangan Menetabkan standart bangunan yang tahan gempa Adanya system pengawasan atas pelaksanaan pembanguanan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan Dokumen Tata Guna Lahan Membuat penyusunan rencana evakuasi a. Tersedianaya jalur dan tempat yanga akan dijadikan titik evakuasi b. Ditetapkanya dan disosialisasikan rencana evakuasi kepada warga c. Adanya tes dan pelatihan evakuasi secara berkala Pencegahan dan Mitigasi Struktural Pada Bangunan baru melakukan penguatan struktur (Retrofifting) untuk pembangunan fasilitas umum	Pemerintah desa dengan pengurus desa lainya maupun masyrakat segera membentuk tim penanggulangan dampak gempa di tingkat desa, Tentukan lokasi posko gempa yang tepat untuk mengungsi lengkap dengan fasiltas dapur umum, kesehatan, MCK serta ketersedian air bersih Membangun system peringatan dini bencana a. Adanya SOP Terkait system peringatan dini b. Adanya dan terpeliharanya system informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan system peringatan dini c. Adanya Alat untuk penyebaran informasi peringatan dini yang mampu menjangkau semua warga d. Adanya petugas yang melakukan pemantauan secara berkala atas informasi Bencana e. Melakukan tes dan pelatihan secara berkala - Memelihara semua fasilitas daninfrastruktur kesiapsiagaan	- Adanya Pedoman standart untuk meyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghapi bencana a. Memeberikan pelatihan (tata cara evakuasi, penerapan system peringatan dini) secara berkala b. Memberikan pendidikan tenatang pemahaman tenagn bencana dan gejalanya - Terbentuknya Tim siaga bencana yang terlatih di desa yang mampu melakukan secara cepat dan tepat melakukan peraktek evakuasi dan operasi tanggab darurat bencana lainya - Melibatkan warga dalam setiap pembahasan mekanisme penenaggulangan bencana, pembentukan tim siaga bencana dan pemebntukan kelompok atau forum Pengurangan resiko bencana - Tersedianya peruntukan anggaran desa untuk setiap kegiatan Penanggulan bencana d - Adanya mekanisme atau menejemen anggaran untuk penanggulangan bencana - Kegiatan pengembangan ekonomi dlam hal peningkatan produksi maupun akses pasar yang lebih aman dari ancaman bencana - Adanya pelatihan dan pendidikan untuk peneingkatan kapasistas dalam memenejemen bantuan

Longsor	Dusun II	Ekonomi Lingkungan Sosial	Tanaman komoditas masyarakat banyak mengalami gagal panen Selama sebulan petani tidak pergi ke lahan Dan yang beerja sebagai buruh banguanan tidakdapat bekerja Lereng Gunung terbelah Aktifitas Bertani warga terganggu	(pengungsian) Tidak terdapat usaha masyarakat yang lebih aman dari ancaman bencana Berada di kawasan rawan Gempa Tidak memiliki pengetahuan mengenai gejala dan cara menghindari longsor	maupun sosial serta hunian warga Pipa di tanam di tanah Melkukan penanaman tanaman keras (kayu jawa) di daerah yang rawan longsor mencegah penebangan liar		
		Ekonomi	Lahan tidak dapat ditanami Pipa dari aliaran air walawera rusak	Lokasi di rawan bencana Berada di lokasi rawan bencana			
		Lingkungan	Menjadi curam dan gundul	Berada di lokasi rawan bencana			

Sumber Diskusi

Bab III

PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN

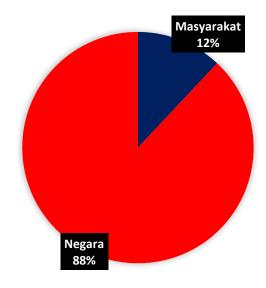
Penguasaan Tanah

Penatagunaan tanah /Pola penggunaan tanah, meliputi penguasaan, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah. Penguasaan tanah dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara orang per-orang, kelompok orang atau badan hukum, penggunaan tanah adalah wujud tutupan bumi baik yang merupakan bentukan alami, maupun buatan manusia sedangkan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah bentuk fisik penggunaan tanah (PP No 16 /2004).

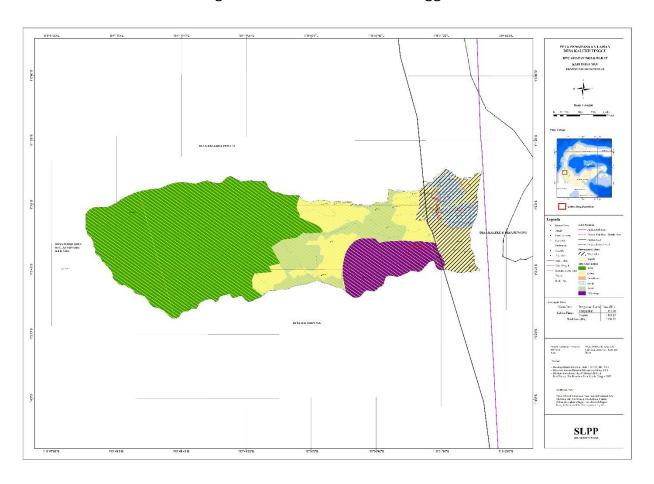
Penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua (dari segi aspek), yaitu penguasaan tanah secara yuridis dan penguasaan tanah secara fisik (Boedi Harsono, 2005). Penguasaan tanah yang dilandasi atas suatu hak yang dilindungi secara hukum merupakan bentuk penguasaan tanah dalam bentuk yuridis dan biasanya penguasaan tanah secara yuridis memberikan kewenangan pengusaan tanah dalam bentuk fisik. Penguasaan tanah/lahan jika ditinjau dari segi statusnya, maka dapat diklasifikasi menjadi lahan yang dikuasai oleh Negara dan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)
1	Masyarakat	157,30
2	Negara	1193,23
	Total Luas (Ha)	1350,53

Grafik Penguasaan Lahan di Desa Kalulu Tinggu



Peta Penguasaan Lahan Desa Kaluku Tinggu



Penguasaan tanah secara yuridis yang ada di Desa Kaluku Tinggu dalam bentuk alas hak atas tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan alas hak atas tanah berupa sertifikat. SKT merupakan pembuktian kepemilikan alas hak atas tanah yang dikelurkan oleh Kecamatan dan diketahui oleh Kepala Desa dalam bentuk tanda – tangan, kemudian SKT memiliki nomer register yang tercatat di Kecamatan dan desa. SKT terdiri dari: 1) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah, yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan dan\juga menyebutkan tentang penggunaan tanahnya; 2) Surat pernyataan atas kepemilikan; 3) Surat pernyataan tidak bersengketa, yang juga harus disaksikan dengan ditanda – tangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pembuat SK; 4) Peta situasi tanah dan pembuktian pembuatan atas pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala Desa erta tanda - tangan dari pembuat SKT di atas materai.

Sedangkan penguasaan tertinggi atas tanah dari aspek yuridis yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk sertipikat yang dikeluarkan atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasioanal. Selain penguasaan oleh masyarakat terdapat juga penguasaan yang dimiliki oleh desa yang menjadi asset desa yang digunakan untuk membangun fasilitas pemerintahan desa. Penguasaan tanah dalam bentuk SKT, umumnya dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk penguasaan tanah untuk lahan pertanian, namun ada sebagain lahan pertanian yang sudah ada yang bersertifikat, begitu juga penguasaan tanah untuk perumahan warga Adapun system kepemilikan lahan yang berlaku di desa di desa umumnya seperti

- Kepemilikan pribadi, merupakan lahan yang kepemilikanya ada pada perseorangan, kepemilikan lahan pribadi ini biasanaya tanah yang digunakan untuk rumah, tanah perkarangan, lahan sawah maupun lahan kebun
- Kepemilikan Keluarga, merupakan tanah yang dimilki secara oleh satu keluarga dan belum diwariskan secara individu pada setiap anggota keluarga
- Kepemilikan Desa, merupakan tanah yang menjadi asset desa

Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Lahan Desa Kaluku Tinggu

Aktifitas pembukaan lahan Desa Kaluku Tinggu tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan utama warga desa sebagai petani, jenis tanaman yang diusahakan oleh petani selain tanaman musiman seperti padi sawah, jagung dan hortikultura, juga terdapat tanaman tahunan sperti coklat maupun kelapa, pemanfaatan lahan untuk tanaman musiman biasanaya dibudidayakan di lahan sawah yang luasnya hanya 3,79 persen dari total luas desa, pemanfaatan lahan untuk persawahan umumnya berada di sekitaran sungai, yang kemudian aliran air tersebut terhubung ke sawah melalui jaringan irigasi, misalkan sungai kurayo yang berada di dusun II, aliran airnya dimanfaatkan untuk menagiri sawah Dusun I dan II melalui jaringan irigasi. Sedangkan untuk pemanfaatan lahan di sector perkebunan campuran yang luasanya mencapai 40,38 persen dan didalamnya terdapat berbagai jenis tanaman seperti coklat, pisang, kelapa serta tanaman tahunan lainya berada disekitaran pemukiman serta sawah, namun khusu kebun campuran yang berada di sebelah timur yang luasanya hingga sampai Kawasan hutan pemanfaatnya belum efektif.

Sedangkan penggunaan lahan untuk pemukiman yang hanya 0,13 persen dari luas desa, di dalamnya selain terdapat rumah hunian warga, serta digunakan untuk kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas pemerintahan di desa. Pola pemukiman desa Kalukulu tinggu berpola menyebar seperti umumnya pola pemukiman di daerah perbukitan, namun untuk rumah yang berada di pusat desa (atau pusat pemerintahan desa) pola pemukimanya linier mengikuti jalan desa , di desa Kaluku Tinggu juga mengenal sataun mukim dalam bahasa lokal seperti Tani merupakan sebutan dati ruamah yang tersendiri atau memisahkan dari yang lain, *Soki* sebuatan untuk satuan mukim yang terdiri dari 2 – 5 rumah, Boya atau asatuan mukim yang terdiri dari lebih 5 rumah dan Ngata satuan mukim yang terdiri dari beberapa Boya, dan untuk penggunaan lahan di areal pertanian juga terdapat istilah lokal seperti Tanompoe sebuatan untuk lahan sawah, Talua sebutan untuk lahan perkebunan dan Ova merupakam sawah yang telah panen atau / bekas perasawahan

Berikutnya adalah, wilayah desa yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, luasanya mencapai 55,33 persen, merupakaan luasan tersebesar jika dibandingkan dengan penggunaan

lahan yang lain yang ada di desa, di dalam Kawasan tersebut juga terdapat sarana wisata yang dikelola oleh KLHK. Pemanfaatan Kawasan hutan oleh masyarakat umumnya memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti mengambil getah pinus maupun damar, selain itu juga ada skitar 6 warga desa yang memanfaatkan kawasan hutan untuk menjadi perkebunan coklat dan yang lain, pemanfaatan tersebut dialkukan oleh warga secara turun-menurun sejak belum adanya penetapan kawasan hutan. di desa Kaluku Tinggi juga terdapat sebutan atau nama lokal pada setiap tempat, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini dan peta tata guna lahan.

Tabel Toponimi dalam istilah lokal

No.	Nama Lokal	Terjemahan	Makna
1	Sibanuvu	Kehidupan	Tempat hidup/kampung tua di
2	Kaluku Ngee	Kaluku = Kelapa, Ngge/Nggeti	Tempat yg ditumbuhi Kelapa kerdil
3	Dayo Mpudu		1) Kubur kecil; 2) Kubur seorang bernama Pudu
4		· ·	Tempat perang zaman dahulu, dimana kebanyakan korban yg meninggal dikuliti kulit wajahya
5		Po = Tempat, Gampulu = nama makanan tradisional terbuat dari Sagu dicampur pisang	Tempat pembuatan Gampulu (makanan tradisional terbuat dari sagu dan pisang)
6	Karavana		Daerah yg ditumbuhi semak tanpa adanya pohon/Daerah padang
7			tempat yg dapat melihat ke semua penjuru arah mata angin/puncak
8		Kamate = Tempat meninggal, Love = nama org	Tempat meninggal seorang bernama Love
9	Vatu Julai	Vatu = Batu, Julai = Tajam	Daerah yg banyak bebatuan tajam
10	Pokapa	Po = Tempat, Kapa = Kapas	Tempat pembuatan kapuk di zaman jepang

11	Binangga Vera/wera	Binangga = Sungai Besar, Wera = Tanda Batas	Daerah yg menjadi batas wilayah antara kalukutinggu dan balumpewa. Menurut tokoh adat di kalukutinggu bahwa org tua zaman dulu menggunakan Mbesa (Kain dari kulit kayu) sebagai batas wilayah tersebut.
12	Sigontu	Suara gemuruh air	Dari tempat ini suara gemuruh air terjun wera mulai terdengar
13	Mantilayo	Melihat dari atas	Melihat dari atas
14	Vatu Nggeti	Vatu= Batu, Nggeti = Nama org	Batu yg ditemukan oleh seorang yg bernama Nggeti
15	Vatu Sudai	Vatu = Batu, Sudai = Terikat	Batu yg saling terikat
16	Ngata Papu	Ngata =Kampung, Papu =	Kampung yg terbakar/dibakar oleh
		Terbakar	Belanda
17	Silowi	Nama tumbuhan sejenis alang- alang	Nama tumbuhan sejenis alang-alang
18	Duria	Durian	Lokasi yang ditumbuhi pohon durian
19	Lima Mao		
20	Mbola	Kampung/pemukiman baru	Kampung/pemukiman baru
21	Vayo Lipe	Vayo = Bayangan, Lipe = Remang-remang	Tempat yg ditumbuhi banyak pepohonan sehingga cahaya matahri sulit masuk/hutan lebat
22	Binangga Kurayo		Sungai yg tidak tau malu karena sering banjir
23	Lare Luo	Lare = Gunung, Luo= Luas	Gunung yg luas
24	Taipa Yufa		Pohon mangga milik seorang yg bernama Yufa
25	Boya Puluna	semacam dusun, Puluna =	Kampung yg terletak disebelah selatan
26	Taniombo	Tani/patani/nantani = Rumah yg tersendiri	sekarang lokasi/tempat tersebut telah menjadi kampung (boya)

27	Boya Ntanga	Boya = kampung/satuan mukim semacam dusun,	Kampung yg terletak ditengah
28	Tampiori		Nama sungai yang debit airnya kecil namun tidak mengalami kekeringan
29	Tonai		Nama sungai musiman
30	Kurondo	Nama tumbuhan sejenis semak	Tempat yg banyak tumbuhan Kurondo
31	Vavu Rone		Tempat seseorang yg terlahir kembar dengan babi
32	Kayu Sina		Nama tumbuhan berduri yg dapat ditenun menjadi kain
33	Porame		Kampung yg ramai
34	Bunggu Sudu	Bunggu = bukit, Sudu = Buntu	
35	Leali	Sembunyi=sembunyi	Kampung tempat acara adat pesta panen (Norego) dilaksanakan. tempat ini menjadi lokasi pertemuan para muda mudi untuk berpacaran secara sembunyi sembunyi
36	Salu Tolemo	Salu = sungai; Tolemo = Jeruk	Sungai yg banyak ditumbuhi pohon jeruk
37	Lagu Samba	Lagu = Nyanyian, Samba = semacam teriakan	Kampung tempat acara adat pesta panen (Norego) dilaksnakan
38	Salu Mambaro	Salau = Sungai kecil, Mambaro = Bersih	Sungai yg selalu keruh kalau banjir
39	Boya Tasina	Boya = kampung/satuan mukim semacam dusun,	Kampung yg berada disebelah utara
40	Padende	Berjingkat	Nama tempat yg agak menurun sehingga menyebabkan orang
41	Vatubula	Vatru = Batu, Bula = Putih	Batu Putih

42	Tasi Nuboya	Tasi = Utara, Boya = Kampung	Disebelah utara kampung
43	Pantosu Lamale	Pantosu = menusuk, Lamale	Aliran air yang memiliki banyak
		= Udang	Udang
44	Taipa Rambu	Taipa = Mangga, Rambu = Nama	Pohon mangga milik seorang yg
		org	bernama Rambu
45	Tabalola	Rantai anjing yg terbuat dari	Tempat seekor anjing yg dirantai
		kayu	menggunakan kayu

Sumber FGD Spasial

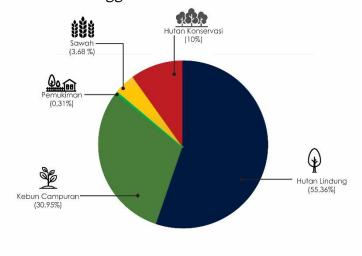
Dan Untuk lebih detail tentang penggunaan dan pemanfaatn lahan dapat dilihat berdasar table dibawah ini (lihat Peta Tata Guna Lahan)

Tabel Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan

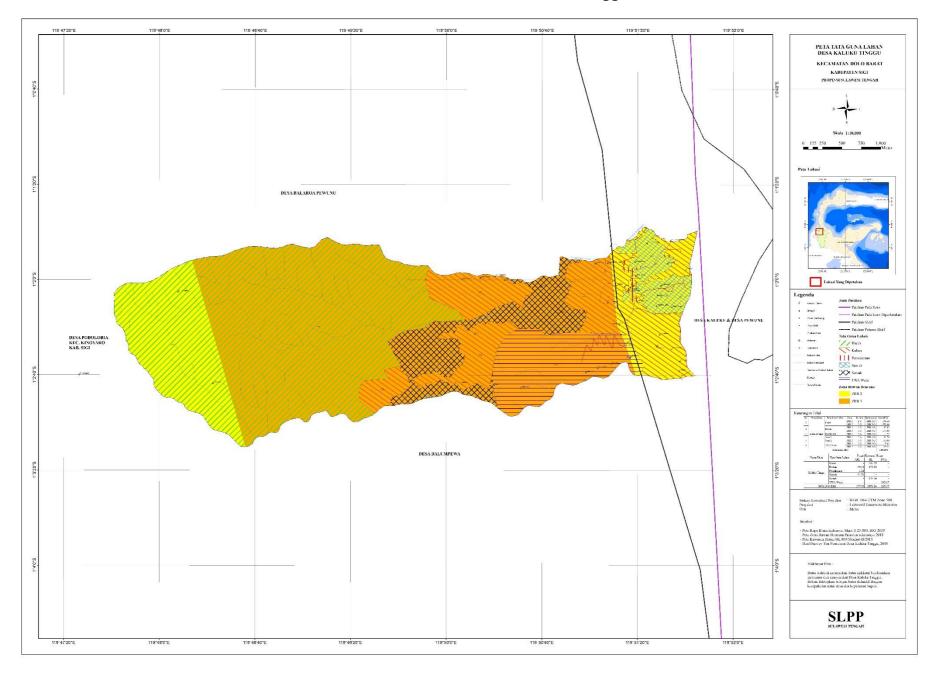
No	Penggunaan dan Pemanfaatan	Luas (Ha)
	Lahan	
1	Hutan Lindung	747,59
2	Kebun Campuran	409,95
3	Pemukiman	4,22
4	Sawah	53,70
5	Hutan Konservasi - TWA Wera	135,07
Luas Total		1.350,53

Sumber Data Spasial

Gambar Grafik Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Lahan



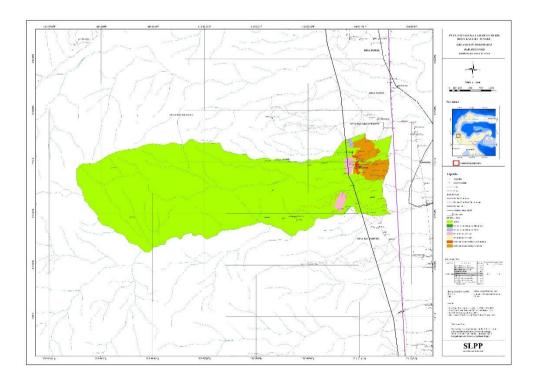
Peta Tata Guna Lahan Desa Kaluku Tinggu



Kesesuaian Lahan

Kesesuaian Lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang Lahan untuk penggunaan tanaman tertentu baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan (Permentan , 79/2013).²³. Tingkat kesesuaian penggunaan lahan merupakan lemampuan lahan merupakan salah satu penting bagian dalam penggunaan lahan. Lahan dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan jika penggunaan lahan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dalam menghitung kesesuaian lahan suatu wilayah, diperlukan analisis kondisi biofisik. Analisis soal kesesuaian tidak hanya menekankan pada hasil yang ekonomis tapi juga berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Selain itu, kesesuaian lahan memperhatikan perlakuan sistem kearifan lokal dalam pengelolaan lahan (JKPP,2015).

Merujuk pada Perda RTRW Kabupaten Sigi kemudian disandingkan dengan kondisi eksisting Tata Guna Lahan Desa Kaluku Tinggu , maka dapat dilihat tingkat kesusaianya dari peta dibawah ini.

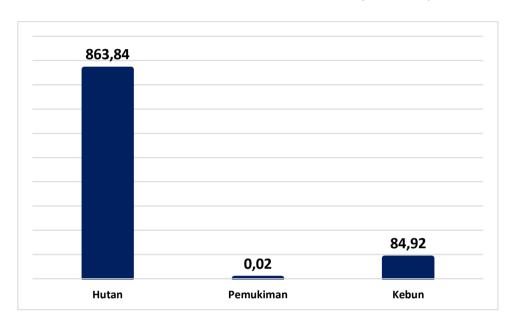


Peta Tata Guna Lahan VS RTRW

_

²³ Pedoman Keseuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan.

Pola ruang desa Kaluku Tinggu 70,25 persen atau 948,79 Ha yang bekesuaian dengan RTRW Kabupaten Sigi, 29,75 persen atau 401,75 Ha dinyatakan tidak sesuai. Dari 1.001,23 yang dinyatakan berkeseuain dengan RTRW Kabupaten Sigi, terbesar ada pada peruntukan hutan lahan kering dengan fungsi lindung maupun konsevasi yang mencapai 91,05 persen, berikut adalah besaran kesesuaian lahan di desa Kaluku tinggu berdasarkan RTRW Kabupaten Sigi.



Grafik Kesesuaian Lahan Berdasar RTRW (dalam Ha)

Dari 401,75 Ha yang dinyatakan tidak berkesuaian Penataan ruang dalam RTRW dengan kondisi eksisting tataguna lahan desa, terbesar ada pada area kawasan hutan sebesar 79 persen yang kini sudah menjadi wialayah kelola masyarakat yang pemanfaatnaya dalam bentuk perkebunan lahan kering, berikutnya 0,15 Ha pemukiman warga dalam RTRW penetapanya sebagai kawasan Hutan, sedangkan 0,83 Ha yang secara eksisting berupa lahan pertanian basah (sawah) milik warga dalam RTRW juga berada dalam penetapan kawasan Hutan

Evaluasi Kelas Kesesuain Lahan

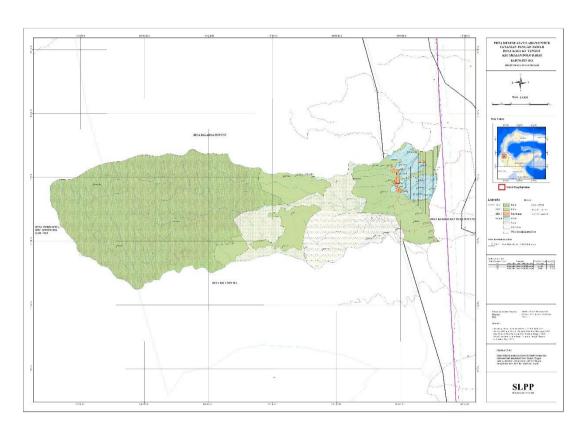
Berdasarkan dokumen "Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016" Bappeda Sigi, dimana Sub kelas kesesuaian lahan yang disajikan dicirikan oleh jenis faktor pembatas berupa ketersediaan unsur hara rendah (n), retensi hara (f), kondisi perakaran/drainase dan tekstur (r), topografi/lereng/mekanisasi (t), banjir/genangan (g), ketersediaan air/iklim (c) dan pengelolaan (p). Berikut adalah klasifikasinya kelas keseuain lahanya

Kelas (Keseuain Lahan)	Pengertian	Keterangan
S1	Sangat sesuai (Hightly Suitable)	Lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap produksinya dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.
S2	Cukup Sesuai (Moderatly suitable)	Lahan yang mempunyai pembatas- pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
53	Sesuai Marginal (Marginally Suitable)	Lahan yang mempunyai pembatas- pembatas yang serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan. Dalam upaya meningkatkan tingkat kesesuaian lahan areal tersebut diperlukan masukan yang lebih besar daripada hasil (output) yang diperoleh.
N1	Tidak Sesuai Pada saat ini (Currently Not Suitable)	Lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki untuk saat ini karena memerlukan waktu dan modal yang cukup besar.
N2	Tidak Sesuai Permanen (Permanently Not Suitable)	Lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelangsungan pada lahan tersebut. Kelas lahan ini tidak sesuai untuk usaha pertanian dalam waktu selamanya.

Sumber dokumen " Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016"

Dan hasil evaluasi kesuaian lahan dalam RTRW kabupaten Sigi di Desa

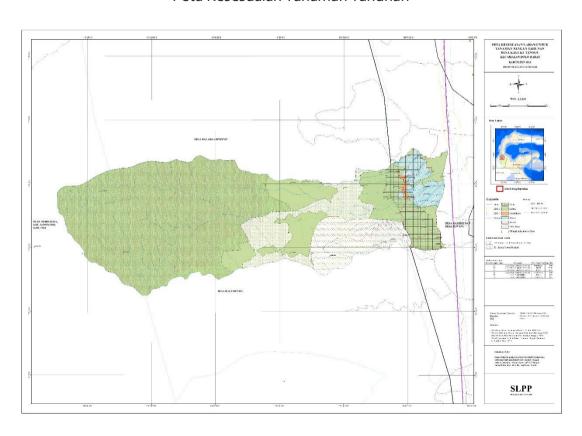
Peta Kesesuaian Lahan Sawah



Peta Kesesuaian Lahan Kering



Peta Kesesuaian Tanaman Tahunan



Kesesuaian lahan (aktual) untuk tanaman padi sawah, tanaman lahan kering dan tanaman tahunan merupakan hasil penilaian sifat-sifat fisik-kimia dan keadaan lingkungan untuk tanaman tersebut dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi yang dimiliki petani. dan beradasarkan nilai kesesuaian lahan aktual di desa Balampewa peruntukan tanamana padi sawah dan tanaman tahunan (RTRW Sigi).

Berdasarkan peta keseuaian lahan diatas, peruntukan lahan sawah dalam RTRW luasannya sebesar 54,82 Ha dengan klasisifikasi kelas kesesuaian lahanya N2 (tidak sesuai permanen) atau dianjurkan tidak dikelola, dan saat di sesuaikan dengan kondisi eksisting tataguna lahan desa, terdapat lahan sawah warga dengan luas 31 Ha yang kelasnya N2, umumnya berada di sebelah timur desa, dan berada di zona rawan gerakan tanah menengah.

Sedangkan untuk kesesuain lahan tanaman kering, berdasarkan kwalifikasi kesesuain lahanya melingkupi dua kelas, dari 102,84 Ha, 99,86 persennya klasifikasi kesesuaian lahanya N2 (tidak sesuai permanen) dan kurang dari 1 persennya kesesuian lahanya N1 (tidak sesuai untuk saat ini), dimana 80,72 dengan klasifikasi N2 secara eksiting tata guna lahannya adalah perkebunan warga, sedangkan yang klasifikasi kesesuain lahannya yang dinyatakan N2 juga berupa kebun. Dan secara keseluruhan jika dilihat dari zonasi rawan bencananya berada di ZRB 2G (Zona Gerakan Tanah Menengah). Dan untuk kesesuain lahan tanaman tahunan juga terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu N1 (tidak sesuai saat ini) dan s3 (sesuai marginal), yang dinyatakan N1 dari luas total evaluasi keseuaian lahannya sebesar 103,48 Ha atau 99 persen dan sisanya dinyatakan s3.

Kelas kesesuain lahan N1 pada lahan tanaman tahunan dan lahan tanaman kering dapat dinaikan hingga S3 atau kesesuaian lahan marginal dengan cara, pertama melakukan konservasi tanah dan air, yaitu dengan cara menghindari sumberdaya tanah dan air dari pencemaran, baik karena penggunaan bahan kimia maupun dari kegiatan lain yang dapat menurunkan kualitas sumberdaya tanah dan air. Kedua, pengelolahan sisa tanaman, dengan cara memanfaatkan sisa tanaman baik berupa jerami maupun limbah pertanian dapat diolah menjadi pupuk organik, pupuk hijau dan bokasi dengan menambahkan EM-4. Hal ini dapat dilakukan karena

bahan-bahan organik tersebut tersedia di lahan usahatani dari hasil panen. Dengan menambahkan bahan-bahan organik tersebut kedalam tanah maka dapat meningkatkan kesuburan tanah, dan menambah sumber hara dalam tanah. Pemanfaatan lahan untuk kelas lahan s3 dengan pembatas kelerengan (t) Komoditi yang dapat dikembangkan: kelapa dalam, kopi, cengkeh dan kakao.²⁴

Karakter lahan di desa Kaluku Tinggu berdasar hasil diskusi serta wawancara dengan warga desa, untuk menglasifikasi tingkat keseuaian lahan dapat dilihat dari tingkat produktifitasnya hasil panen, kedalaman lapisan humus, serta dapat dilihat dari ringkat komposisinya anatara liat, batu dan pasir hingga sampai pada karaker warna tanahnya, berikut adalah tingkat kesesuain tanaman jagung., sedangkan tektur tanahmya liat berbatu dan liat berpasir,dengan karakter warna hitam hingga hitam kecoklatan.

Berikut adalah karakter lahan yang ada di desa Kaluku Tinggu dengan Komoditas tanaman Jagung varietas Hibrida yang , yang juga merupakan mayoritas tanaman komodistas pertanian yang di usahakan oleh warga desa Kaluku Tinggu.

Tabel Ksesuaian lahan untuk Tanaman Jagung

INDIKATOR	SESUAI		TIDAK SESUAI	
	Sangat Sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Sangat tidak sesuai
Jumlah bibit 1 kg	Menghasilkan > 3 karung	Menghasilkan > 2.5 karung	Menghasilkan > 2 karung	Menghasilkan > 1.5 karung
Warna tanah	Hitam	Coklat hitam	Kuning kecoklatan	Kuning
Perbandingan pasir, liat dan batu	Sedikit pasir, tidak ada batu besar	Pasir = tanah tidak berbatu	Lebih banyak pasir daripada tanah	Banyak batu
Ketebalan tumpukan daun	Tebal	Sedang	Sedikit	Tidak ada

²⁴ Sumber dokumen "Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016"

Tumbuhan asal sebelum dibuka	Hutan, jurugan tuna	Bekas huma	Bekas huma	Padang rumput
Kondisi tumbuhan yang ada	Lebat	Jagungnya subur	Jagungnya kurang subur	Jarang ada pohon besar
Lamanya setelah dipakai untuk berladang	Belum pernah dipakai , 1 kali dipakai	2 bulan setelah berladang	3 bulan setelah berladang	5 – 6 bulan
Tanaman pendamping atau campurannya	Tidak ada	Tidak ada	Cabai	Rumput liar
Catatan penting lainnya	Tanah yang baik dicirikan tidak ada kayu bukit, kayu masam	Sangat baik kalau ditanami setelah bekas jagung mulai membusuk	Setelah tanam dua kali jagung	Sering ada hama

Sumber Diskusi dan Wawancara

Tanah yang ada di desa Kaluku Tinggu bersifat kompetibel, Berdasarkan penelusuran, di desa Kaluku Tinggu jika dilihat kedalaman solumnya (kedalaman tanah yang bisa dipakai untuk perakaran tanaman) sangat bervariatif, dalam satu tahun untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung bisa samapi dua kali panen selain itu juga terdapat tanaman hortikultura, sementara penggunaan lahan untuk tanaman tahunan seperti coklat dan kelapa dan jenis tanaman hortikultura lainya yang bersifat musiman.

Perencanaan Desa Kaluku Tingu

Hak yang melekat pada desa untuk dapat secara mandiri menyusun perencanaanya, berlandaskan "hak asal usul "dan "Kewenangangan lokal skala desa' yang termaktub dalam pasal 19 huruf a dan b Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, kedua hak tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan pelaksana UU Desa , yaitu di Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: a. sistem organisasi

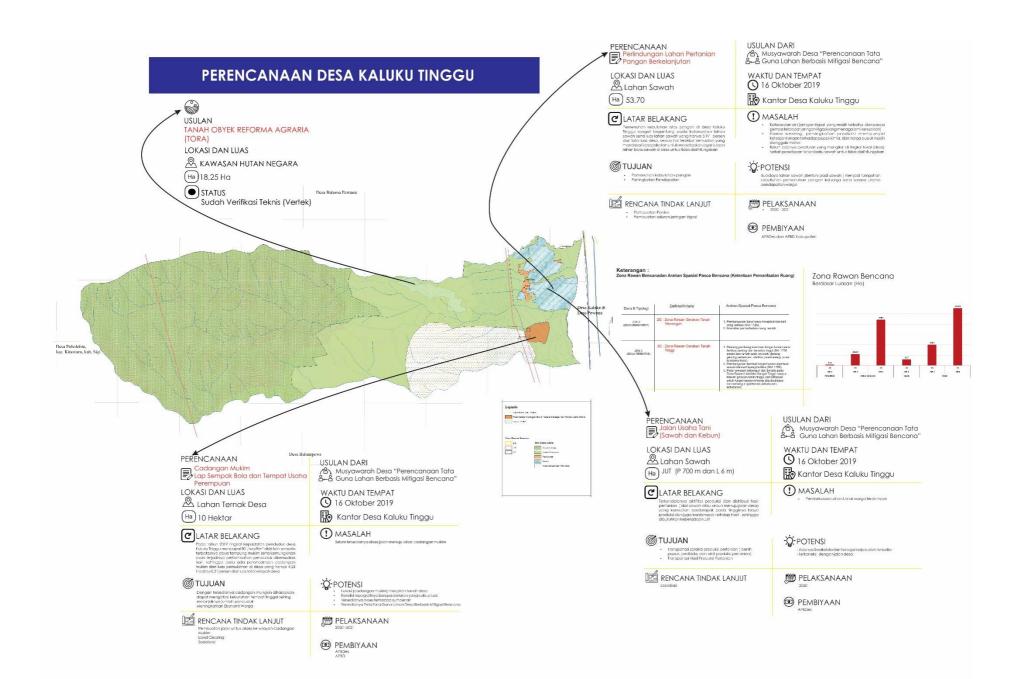
perangkat Desa; b. sistem organisasi masyarakat adat; c. pembinaan kelembagaan masyarakat; d. pembinaan lembaga dan hukum adat; e. pengelolaan tanah kas Desa; f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g. pengelolaan tanah bengkok; h. pengelolaan tanah pecatu; i. pengelolaan tanah titisara; dan j. pengembangan peran masyarakat Desa. (pasal 2)

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 5).

Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa "Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsusr masyarakat desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Pasal 1 ayat 10). Kemudian dijelaskan bahwa Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolahan pembanguana di desa dan kawasan pedesaan yang dikordinasikan oleh kepala desa dengan menegedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarurtamaan perdamaian dan keadilan sosial"

Sedangkan untuk perencanaan partisipatif ditandai oleh adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai melkukan dari analisis masalah, memikirkan bagaimana cara mengatasinya , mendapatakan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah , dan desa (Masyarakat)

mengambil keputusan sendiri tentang alternative pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi (Kabar JKPP, 2016)



BAB IV

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- 55,33 persen (747,59 Ha) wilayah desa Kaluku Tinggu ditetapkan sebagai kawasan hutan, penetapan ini merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.869/Menhut -II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah
- Pada 28 September 2018, saat terjadi gempa bumi di Palu, Sigi dan Donggala dengan kekuatan 7,4 Sr yang diakibatkan oleh pergerakan sesar Palu-Koro, berdampak pada rusaknya rumah warga, terdapat 8 rumah yang mengalami rusak berat dan kurang lebih ada 60 rumah yang yang mengalami rusak sedang dan ringan
- Berdasarkan Peta Zona Ruang Rawan Bencana Palu dan sekitarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara keseluruhan wilayah desa Kaluku Tinggu ditetapkan sebagai kawasasan Zona Rawan Bencana (ZRB), untuk pemukiman, sawah dan sebagian Kawasan hutan masuk dalam ZRB 2 G atau Zona Rawan Gerakan Tanah Menengah dan sebagin besar Kawasan hutan dan kebun campuran warga yang berada di sebelah barat pemukiman berada pada ZRB 3 G atau Zona Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi
- kepadatan fisiologis (physiological density) atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan tanah yang diolah, untuk desa kaluku tinggu besaranya 80 Jiwa/Km², . Namun yang menjadi catatan adalah lahan khusus pangan atau lahan sawah di desa Kaluku Tinggu hanya 4 persen dari total luas wilayah desa.
- kepadatan penduduk agraris atau perbandingan penduduk yang mempunyai aktivitas di sector pertanian atau bekerja sebagai petani dengan luas lahan pertanian di desa besaranya 16 Jiwa/Km². namun yang harus menjadi catatan berdasar data Profil Desa Kaluku Tinggu di tahun 2018 terdapat 60 KK yang tidak mempunyai lahan.

• Dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi (saprodi) atau kebutuhan lainya, di desa Kaluku Tinggu terdapat petani padi sawah yang mengingkatkan diri kepada tengkulak atau pemilik gilingan padi dalam bentuk hutang (saprodi atau uang) yang ada di luar desa, system hutang atau panjar tersebut kemudian ada sebuah perjanjia atau kontak yang tidak tertulis antara pemberi pinjaman dengan petani, besar kecilnya hutang yang akan diberikan petani tergantung pada luasan lahan yang digarap, semakin luas lahan yang digarab maka jumlah hutang yang diberikan lebih besar daripda petani yang berlahan sempit, untuk pembayaraan akan dilakukan saat panen, dan ketentun besarnya pembayaran hutang tergantung dari lamanya pinjaman dengan sistem potongan hasil panen

Saran

- Ketersedian modal dalam usaha pertanian, menjadi salah satu faktor yang kemudian dapat menunjang efektifitas dan peningkatan produksi hasil panen, sehingga untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan lembaga keungan yang kemudian dapat dikelola oleh desa dengan ketentuan yang tidak memberatkan petani
- Ketersedian air menadi salah satu faktor penting untuk prningkatan kwalitas maupun kuantitas hasil panen, sistem pengairan untuk lahan pertanian dalam bentuk irigasi yang ada di desa belum cukup memadai, maka dibutuhkan upaya pemerintah untuk mneyediakan saluran irigasi yang kemudian dapat dimanfanfaatkan oleh warga khususnya petani secara maksimal

Daftar Pustaka

APBDes Desa Kaluku Tinggu, 2019

Bappeda Sigi dan Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako "Analisis Pemetaan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016

BPS Sigi, Analisis Nilai Tukar Petani Kabupaten Sigi 2019

Harsono, Budi.2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta; Djembatan

Munir, M. 1996. Tanah-Tanah Utama Indonesia. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Profil Desa Kaluku Tinggu 2019

Rathna Wijayanti dkk, Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo (2016)

Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. Working Paper No. 72. Retrieved from

https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/Sconnes1998.pdf.

Zakaria, R Yando. 2014. Peluang dan Tantangan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

http://idm.kemendesa.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecam atan=721011&id_desa=7210112011&tahun=2019,

http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/140/2018/06/tanah-inceptisol.pdf

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/85

http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/130/

http://www.litbang.pertanian.go.id/varietas/198/

http://old.litbang.pertanian.go.id/varietas/one/131/

http://cybex.pertanian.go.id/artikel/80858/herbisida-kontak-dan-sistemik/

https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah

Lampiran :

Tabel Kesesuaian Lahan Tataguna Lahan VS RTRW

Nama Desa	Desa RTRW vs TGL	
	Hutan Lahan Kering vs Kebun	317,78
	Hutan Lahan Kering vs Pemukiman	0,15
	Hutan Lahan Kering vs Sawah	0,83
	Pemukiman vs Kebun	7,80
	Pemukiman vs Sawah	0,43
	Pemukiman vs TWA	8,37
	Pertanian Lahan Kering vs	
Kaluku Tinggu	Pemukiman	4,05
Raiaka Tingga	Pertanian Lahan Kering vs TWA	9,90
	Sesuai (Hutan Lahan Kering/Hutan)	747,59
	Sesuai (Hutan Lahan Kering/TWA)	116,26
	Sesuai (Pemukiman/Pemukiman)	0,02
	Sesuai (Pertanian Lahan	
	Kering/Kebun)	84,92
	Sesuai (Pertanian Lahan	
	Kering/Sawah)	52,44
	1.350,53	

Tabel Evaluasi Kesesuain Lahan RTRW

	Kesesuaian Lahan T.Tahunan & Tataguna Lahan					
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah		
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Pemukiman	3,84	Konservasi dan Pengelolaan		
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Sawah	22,54	Konservasi dan Pengelolaan		
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Kebun	81,43	Konservasi dan Pengelolaan		
S3	Lahan Sesuai Marjinal	Kebun	0,05	Pengelolaan dan Terassering		

Kesesuaian Lahan T.Sawah & Tataguna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah

N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Pemukiman	0,38	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Sawah	31,03	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	24,01	Tidak Dikelola

Kesesuaian Lahan T.Kering & Tataguna Lahan				
Kelas Kesesuaian Lahan	Keterangan	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Input Masukan Kelas Tanah
N1	Lahan Tidak Sesuai Saat Ini	Kebun	0,15	Konservasi dan Pengelolaan
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Pemukiman	3,84	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Sawah	22,57	Tidak Dikelola
N2	Lahan Tidak Sesuai Untuk Selamanya	Kebun	80,79	Tidak Dikelola